



IRPIA

VOLUME 8 NOMOR 5; APRIL – JUNI 2023

Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan

PENERBIT:
Institut Riset dan Pengembangan Indonesia
2023

ejournal.irpia.or.id

DAFTAR ISI

Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura

Reza Julieta
Brillianty.....1-15

Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Sebagai Rekayasa Sosial Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya

Inge Adellia, Manda Ayu Febrianti, Siti Nurhaliza Maulida.....16-25

Kualitas Pelayanan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe (Bmw) Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Anindita Fitrianti, Dr. Lukman Arif, M. Si26-38

Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat: Effort To Manage Stunting In Children In Solok Regency, West Sumatera Province

Rizqa Inatsaa Septivani, Ditha Arsyia Arshita, Alvien Adiwidya Permana.....39-47

Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Go-Online (Gool) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo

Achmad Budi Isharyono, Dra. Susi Hardjati, M.AP.....48-57

Analisis Manajemen Aset Sekolah Dasar 001 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Dalam Mendukung Proses Pembelajaran

Brigita clara, Dr.Sri Umiyati M.Si.....58-63

Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura

Reza Julieta Brillianty
Universitas Hang Tuah Surabaya
*Corresponding author: rezajulieta45@gmail.com

Abstrak

Indonesia dan Singapura merupakan negara dengan kondisi geografis yang berdekatan, batas negara yang saling terhubung dan juga memiliki latar belakang sejarah yang dekat. Negara Singapura adalah memiliki posisi yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia, kekurangannya yaitu kondisi alam yang kurang memiliki keragaman sumber daya alam. Singapura dan Indonesia termasuk kedalam benua Asia Tenggara, memiliki iklim tropis. Perbandingan sistem politik, ekonomi, teknologi dan pertahanan dan keamanan membandingkan dua negara atau lebih dalam hal sistem pemerintahan atau lainnya untuk menemukan persamaan maupun berbedaan dalam satu negara bahkan banyak negara, karena disetiap negara memiliki bentuk pemerintahannya sendiri. Disini peneliti membandingkan dua negara yaitu Indonesia dan Singapura dengan metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang kenyataan di antara berbagai faktor atau berbagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis deskriptif yang berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci mengenai objek penelitian. Hasilnya Negara Indonesia memiliki persamaan dalam bentuk pemerintahan yaitu republik selain itu juga memiliki kesamaan dalam sistem ekonomi, teknologi dan pertahanan dan keamanan.

Kata kunci: Indonesia-Singapura, Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan dan Keamanan

Abstract

Indonesia and Singapore are countries with close geographical conditions, connected borders and also have a close historical background. The country of Singapore has a strategic position as a world trade route, the drawback is the natural conditions that lack a variety of natural resources. Singapore and Indonesia are included in the continent of Southeast Asia, have a tropical climate. Comparison of political, economic, technological and defense and security systems compares two or more countries in terms of government systems or others to find similarities or differences in one country and even many countries, because each country has its own form of government. Here the researcher compares two countries, namely Indonesia and Singapore. This research method is a qualitative research, namely to get a general picture of reality among various factors or various social phenomena that occur in people's lives. For this reason, in this study a descriptive analysis method will be used which seeks to explain and describe in detail the object of research. As a result, the Indonesian state has similarities in the form of government, namely a republic, but it also has similarities in the economic system, technology and defense and security.

Keywords: Indonesia-Singapore, Politics, Economy, Technology, Defense and Security

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk Republik, terletak dikawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luasdaratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas:Utara - Negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Selatan - Negara Australia, SamuderaHindia. Barat - Samudera Hindia.Timur - Negara Papua Nugini, Timor Leste, Samudera Pasifik. Luas wilayah Singapura sangat jauh jika dibandingkan dengan Indonesia, tetapi dari jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang justru lebih banyak. Luas Singapura tercatat 728,6 km persegi, sementara berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) luas Indonesia 1,92 juta km persegi. Artinya, luas Singapura hanya 0,03% saja dari Indonesia. Singapura hanya sedikit lebih besar ketimbang DKI Jakarta yang memiliki luas 664 km persegi.

Singapura Indonesia dan Singapura merupakan negara dengan kondisi georgrafis yang berdekatan, batas negara yang saling terhubung dan juga memiliki latar belakang sejarah yang dekat. Singapura merupakan wilayah ujung selatan dari malaya, yang pertama kali dijalankan pemerintahan oleh Sang Nila, pangeran asal Sriwijaya yang sempat berpusat di wilayah Palembang dan melarikan diri ketika Sriwijaya diserang oleh kerajaan Chola dari India. (Jean E. Abshire, 2011:19). Hubungan bilateral antara Indonesia dan singapura telah terjalin dengan baik selama 52 tahun, sejak tahun 1967,2 tahun setelah Singapura resmi merdeka dan memisahkan diri dari Malaysia. Hubungan resmi ini dijalin dengan dibukanya kedutaan besar milik masing-masing negara di wilayah negara lain nya. Diawal hubungan ini terjalin, kondisi kedua negara merupakan negara baru namun memiliki peran yang berbeda dalam kontestasi politik internasional. Pada awal dijalin nya hubungan bilateral, hubungan antara Indonesia dan Singapura tidak seerat hubungan kedua negara pada saat ini. Pasang surut hubungan banyak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian diatas. Dengan berbagai polemik dan kepentingan pada saat itu, banyak terjadi konfrontasi atau konflik antara Indonesia dan Singapura. Pada masa kepemimpinan Soekarno, ketika Singapura masih menjadi negara bagian dari federasi Malaysiadan dipimpin oleh perdana menteri Lee Kuan Yew, hubungan Indonesia dan Singapura tidak terlalu baik.

Indonesia adalah negara demokratis berasaskan keyakinan, bahwa satu lembaga politik harus menjamin adanya kebebasan dan persamaan, di samping menjunjung tinggi kekuasaan hukum dan sistem perwakilan rakyat dalam parlemen. Maka tugas pokok negara dan pemerintahan di dalam demokrasi ialah melindungi bangsa dan negara terhadap agresi dari luar dan pengorongan dari dalam yang merusak kesatuan dan persatuan, menegakkan kekuatan hukum dan menjamin keadilan, serta melaksanakan segenap konvensi dan peraturan, agar tercapai ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan di dalam negeri, sebab hukum merupakan kekuatan pokok guna menegakkan ketertiban. Makamembimbing rakyat itu harus diartikan sebagai mendidik semua warga mayarakat, anak, orang dewasa dan orang lanjut usia, supaya: bisa berkembang dengan bebas danmaksimal, dan mampu melakukan realisasi-diri, bekerja dan hidup sejahtera. Singapura adalah sebuah pulau yang terletak di ujung Semenanjung Tanah Melayu, yang awalnya bernama "Pulau Ujung" (Pu-Lo-Chung), "Salahit" Selat, dan berikutnya "Temasek", "Tumasik" (Jawa), "Tam-ma-sik" (China). Istilah Singapura sendiri muncul pada tahun 1299 ketika Pangeran Sang Nila Utama singgah di pulau ini dan menemukan seekor binatang seperti Singa, sehingga pulau itu disebut Lion City (Kota Singa).

Singapura dulu awalnya memiliki sistem pendidikan yang buruk, perumahan buruk, kesehatanwarga buruk. Saat itu, merebak epidemi kolera dan TBC serta angka kelahiran tinggi pada era yang dulu disebut Baby Boom. Maka, Lee senior menetapkan prioritas pertamanya adalah menggenjot masalah kesehatan dan pendidikan. Dimulailah program kesehatan, seperti keluarga berencana (KB) untuk mengendalikan tingginya angka kelahiran, pembangunan perumahan secara massal, dan menggenjot layanan kesehatan, mulai dari memperbanyak pipa air bersih hingga menambah jumlah klinik kesehatan ibu dan anak agar vaksinasi atau imunisasi bisa segera dijalankan. Pemerintah Singapura segera menggelontorkan subsidi pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi tak sepenuhnya menggratiskan. Pemerintah tetap mengenakan

biaya untuk penebusan obat. Kata Lee, pasien suka malas minum obat jika obatnya digratiskan. Jika membayar, pasien akan meminum obatnya secara serius.

Pemerintah Singapura mempertahankan kebijakan ini dalam waktu cukup lama dan secara bertahap disusul dengan kebijakan baru, yaitu membuat skema tabungan kesehatan wajib. Sekitar 6-8persen penghasilan warga negara wajib masuk ke rekening tabungan medis pribadi. Ketika warga jatuh sakit, uang tabungan medis inilah yang akan membantu membiayai kesehatan mereka. Cara ini pula yang sekian tahun kemudian mulai disiapkan oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang akhir jabatannya dan dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo dengan melahirkan program asuransi kesehatan BPJS. Meski kacau dan babak belur di awal, perlahan bisa berbenah dan sangat membantu pembiayaan pengobatan secara nasional. Di bidang kesehatan, Pemerintah Singapura serius membangun dan menjaga kualitas layanan kesehatan sehingga sampai sekarang berbondong orang berobat ke sana. Perawatan di rumah sakit (RS) itu penting, terutama bagi yang sudah jatuh sakit berat/kritis dan memerlukan perawatan intensif.

Namun, tak semua perawatan harus dilakukan di RS. Ada yang bisa dilakukan di rumah saja untuk melakukan rawat jalan atau menjaga agar tetap fit dan bisa beraktivitas. Inilah yang disebut *stepdown care*, suatu model layanan perawatan bertahap, di mana perawatan RS dihubungkan secara rujukan dengan perawatan di RS komunitas, panti jompo, dan perawatan mandiri di rumah. Model initerutama untuk mengakomodasi populasi geriatri (usia di atas 60 tahun) yang berpotensi memerlukanperawatan jangka panjang, juga untuk kelompok yang sakit tertentu, seperti pasca-stroke. RS tak akanmampu melakukan segalanya, bahkan bisa menghadapi krisis tempat tidur ketika jumlah pasien melonjak jauh lebih cepat dari laju pertumbuhan tempat tidur RS. Dengan step down care, Pemerintah Singapura bisa memenuhi perawatan kesehatan berkualitas untuk rakyatnya.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Singapura membangun sistem pendidikan dari awal yang buruk, tak lebih baik daripada kondisi Indonesia pada periode awal kemerdekaan. Namun, kini, Singapura dikenal sebagai negara yang kualitas sistem pendidikannya termasuk papan atas di tingkat dunia. Setelah sukses membenahi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, kini target Singapura adalah meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Ini yang dilakukan untuk mencetak SDM unggul berdaya saing tinggi, yang mengantarnya menjadi negara maju. Singapura konsisten menjalankan program yang terencana jangka panjang. Jika dintisarikan, Singapura melewati lima tahapan pembangunan dengan fokus berbeda. Pada dekade 1960-an, perekonomian masih berlandaskan tenaga kerja rendahan karena memprioritaskan terbukanya lapangan kerja. PDB per kapita periode itu sekitar 1.300 dollar AS per tahun. Pada dekade 1970-an, perekonomiannya didasarkan pada tenaga kerja terampil dan ahli, dan dekade 1980-an dilandaskan pada modal karena Singapura sudah mulai kaya.

Dekade 1990-an dilandaskan pada pencapaian teknologi, dan dekade 2000-an pada teknologi yang lebih maju dan inovasi. Ini yang membuat Singapura pada 2019 menempati posisi teratas dari 141 negara dalam Indeks Daya Saing Global 4.0 (Indonesia ke-50). Pada dekade 1990-an hingga 2000-an inilah ekonomi Singapura melesat sehingga pada 2021 PDB per kapita sudah lebih dari 70.000 dollar AS. Kemajuan pencapaian iptek mendorong ekonomi tumbuh jauh lebih pesat. Memang ada harga yang harus dibayar rakyat Singapura demi mencapai kemajuan dan kemakmuran. Rakyat tak bisa menyatakan pendapat sebebaskan seperti rakyat Indonesia. Politik, pers, dan demokrasi di Singapuratak sebebaskan di Indonesia. Sejak memperoleh kemerdekaan 1957, Singapura selalu diperintah Partai Aksi Rakyat, tanpa pernah ada pergantian kekuasaan. Akan tetapi, dengan segala batasan kebebasan itu, ekonomi dan kemakmuran Singapura melaju kencang, jauh meninggalkan negara tetangga yang lebih demokratis.

Ini berbeda dengan Korea yang sejak awal setelah terbebas dari penjajahan Jepang sudah terpecah jadi Korea Utara dan Korea Selatan. Dengan semangat membalas dendam pada bekas penjajahnya, Korsel bekerja keras hingga mampu bersaing dengan Jepang. Sekarang Korsel bisa dikatakan hampir sejajar dengan Jepang dalam hal kemajuan teknologi dan kemakmuran. Bahkan, dalam hal penetrasi budaya, Korsel lebih sukses. Drama Korea dan musik Korea sukses penetrasi ke seluruh dunia. Padahal, situasi di

Korsel penuh gejolak politik, kudeta, perlawanan oposisi mahasiswa, represi militer, sampai pembunuhan presiden. Empat bekas presiden terlibat korupsi, diadili dan dipenjara. Mereka adalah Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Roh Moo-hyun, dan Park Geun-hye (putri mantan Presiden Park Chung-hee yang tewas ditembak oleh kepala badan intelijen Korsel, 1979).

Pangkal kemajuan dimulai dari badan yang sehat jasmani-rohani, pendidikan berkualitas, dan kemajuan iptek. Namun, hebatnya, dengan segala gejolak itu, Korsel mampu meraih kemajuan dan kemakmuran. Bermunculan raksasa chaebol, seperti Hyundai, Daewoo, Samsung, dan LG, yang merangsek ke banyak negara di dunia. Drakor dan grup musik Korsel sekarang jadi idola anak milenial dan emak-emak di berbagai belahan dunia. Baik Singapura yang politiknya kaku monoton maupun Korsel yang penuh gejolak bisa maju karena menomorsatukan pembangunan SDM unggul dengan pendidikan yang berkualitas hingga menguasai teknologi, bukan dengan mengeksploitasi kekayaan alam. Berkaca dari situ, kita bisa memacu untuk mengejar kemajuan. Pangkal kemajuan dimulai dari badan yang sehat jasmani-rohani, pendidikan berkualitas, dan kemajuan iptek. Pendidikan tinggi dan lembaga riset harus berbenah membangun budaya inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berlipat hingga penuh manfaat untuk rakyat, bukan sekadar menikmati kemapanan budaya birokrasi. Di sisi lain, para ahli pendidikan harus diajak merancang konsep pendidikan karakter kebangsaan melalui pengembangan kurikulum sesuai abad ke-21 sehingga nantinya bukan hanya menghasilkan alumnus yang brilian lengkap dengan keahlian teknologi modernnya, melainkan juga berkarakter, berakhlak, dan tidak gampang korupsi.

Metode

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang kenyataan di antara berbagai faktor atau berbagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis deskriptif yang berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci mengenai objek penelitian (Casterle, 2012) yaitu Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia Dan Singapura.

Pada penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif. Alasannya, karena metode tersebut sesuai dengan isi dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan juga agar pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan hasil penelitian yang bermanfaat. Diketahui bahwa, metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto, 2007). Pada dasarnya, pelaksanaan penelitian ini memiliki kegunaan untuk mendapat beberapa bahan, meliputi: konsep, teori, peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dan juga sistem hukum.

Hasil

Analisis Perbandingan Fungsi Indonesia Dan Singapura

NO	UNSUR PERBANDINGAN FUNGSI	PERBANDINGAN NEGARA	
		INDONESIA	SINGAPURA
POLITIK			
1	Sistem Pemerintahan	Presidensial	Parleментар
2	Badan Eksekutif	Presiden, Wakil Presiden	Perdana Menteri
3	Badan Legislatif	MPR, DPR, DPD	Parlemen

4	Badan Yudikatif	MA, MK, KY	Mahkamah Agung serta Peradilan Dibawahnya Oleh Konstitusi Singapura
5	Tingkat Korupsi	Indonesia merupakan negara yang tingkat korupsinya cukup tinggi.	Singapura masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah.
EKONOMI			
1	Sistem Ekonomi	Indonesia Menganut sistem Ekonomi Pancasila	Singapura menganut sistem Ekonomi pasar yang maju.
2	Ekspor-Import	Indonesia bergantung pada hasil Ekspor hasil pertanian dan Import barang-barang Industri.	Singapura sangat bergantung pada Ekspor dan pengolahan barang Import khususnya di bidang Manufaktur (sektor Elektronik, pengolahan minyak Bumi, bahan kimia, teknik mekanik dan ilmu Biomedis)
TEKNOLOGI			
1	Kemajuan Teknologi	Di Indonesia masih berkembangnya IPTEK, sehingga alat-alat komunikasi atau yang lainnya masih mengimpor dari negara lain (Hp, sepeda motor, mobil, laptop, komputer, dll).	Teknologi di Singapura cukup maju
PERTAHANAN DAN KEAMANAN			

1	Sistem PertahananDan Keamanan	Setiap warga negara Indonesiaberhak dan wajib ikut dalam upaya bela negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara.	UU di Singapura mensyaratkan setiap warganegara dan penduduk tetappria Singapura siap beroperasi dan menjadi serdadu cadangan sampai usia 40 tahun, tetapi harus menjalani National Service
---	-------------------------------	---	---

Analisis Persamaan Fungsi Indonesia Dan Singapura

NO	UNSUR PERSAMAAN FUNGSI	PERSAMAAN NEGARA	
		INDONESIA	SINGAPURA
POLITIK			
1	Bentuk Pemerintahan	Republik	Republik
2	Sistem Kepartaian	Multipartai	Multipartai
EKONOMI			
2	Sistem Pajak	Di Indonesia pajak dan Retribusi daerah untuk tambahan pendapatan negara.	Singapura memperkenalkan PajakBarang dan Jasa yang menambah pendapatanpemerintah dan menyeimbangkan keuangan pemerintah.

Diskusi

A. Analisa Persamaan Dan Perbandingan Fungsi Negara Indonesia Dan Singapura

1. Politik

Indonesia dan Singapura adalah negara yang berdekatan. Keduanya merupakan negara demokratis dan sama-sama menganut sistem multi partai. Meskipun memiliki kesamaan dalam sistem kepartaian, tingkat korupsi di Indonesia dan Singapura sangatlah kontras. Salah satu faktor penyebabnya adalah Singapura memiliki sistem dan aturan jelas yang mengatur dana partai politik.ingapura dan juga Indonesia merupakan negara kesatuan. Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki banyak partai yang sistem pemerintahannya parlementer dan bentuk pemerintahan Republik. Indonesia adalah negara yang menganut

pemisahan kekuasaan yang dipengaruhi oleh Jhon locke. Jhon locke mengemukakan tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif yang mana disebut dengan trias politika. Trias politika adalah sebuah prinsip bahwa kekuasaan sebagiknya tidak diserahkan terhadap orang yang sama agar mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika atau pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga yang kedudukannya sejajar. Pada negara Indonesia, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan dari pemimpin tidak memiliki sifat mutlak. Republik parlementer merupakan bentuk dari pemerintahan Singapura. Ketika terdapat republik yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem parlementer maka republik tersebut dapat dikatakan sebagai republik parlementer. Presidensial merupakan sistem pemerintahan Indonesia. Badan yudikatif, eksekutif dan juga legislatif merupakan badan yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara.

Singapura adalah negara yang menjadi pusat perhatian karena keunikannya. Singapura terletak di Asia Tenggara yang dipimpin oleh etnis tionghoa yang memiliki penduduk sebanyak lima juta lebih yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan bangsa ASEAN. Singapura sebagai negara demokrasi yang pemerintahannya berbentuk republik parlementer yang mana kepala negaranya dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Sedikit berbeda dengan Indonesia untuk pemilihan presiden di Singapura dipilih oleh rakyat langsung setiap enam tahun sekali. Terkait dengan partai di Singapura menggunakan sistem multipartai sama halnya dengan Indonesia. Sama dengan Indonesia Singapura juga terdapat tiga kekuasaan. Parlementer merupakan sistem pemerintahan dari negara Singapura. Pada konstitusi negara Singapura tercantum beberapa lembaga yang memegang kekuasaan yudikatif, eksekutif dan juga legislatif.

Presiden merupakan kepala negara Singapura. Kabinet yang ada pada negara Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri dan diketahui bahwa pada negara Singapura, kabinet melaksanakan administrasi pemerintahan. Pada konstitusi di pemerintahan Indonesia terdapat hukum dasar tertulis, yakni UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 mengalami empat kali amendemen selama tahun 1999 sampai dengan 2002, yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi negara dan telah berlaku sejak diberlakukannya pada 22 Desember 1965. Majelis Nasional memiliki wewenang untuk mengubah sebagian besar ketentuan konstitusi melalui suara mayoritas. Namun, beberapa ketentuan penting hanya dapat diubah melalui referendum nasional.

2. Ekonomi

Perekonomian Negara Indonesia dan Negara Singapura perbedaannya cukup tinggi, Negara Indonesia wilayahnya lebih luas dibandingkan Negara Singapura sebenarnya dengan hal ini Indonesia bisa lebih maju daripada Singapura. Indonesia adalah Negara yang kaya seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki untuk bersaing dengan Negara tetangga. Banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki Indonesia untuk menaikkan kondisi ekonomi di wilayahnya. Berbagai macam sektor di Indonesia bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan negara, seperti sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Indonesia dapat memaksimalkan berbagai macam sektor yang dimiliki, khususnya pada sektor pertanian seperti julukannya Indonesia adalah Negara agraris, seharusnya hasil output dari sektor pertanian dapat diekspor di berbagai Negara namun kenyataannya Indonesia tetap memilih jalan import untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Secara luas negara Indonesia memiliki lebih besar wilayah dibandingkan Singapura.

Namun, pada kenyataannya, Indonesia bahkan lebih banyak mengimport berbagai kebutuhan dari luar negeri. Pengimportan yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan anggaran negara menjadi berkurang dan kondisi ekonomi di bidang pertanian masyarakat Indonesia tidak mengalami peningkatan. Jika setiap sektor yang ada di Indonesia ini dimaksimalkan, ekonomi di negara ini bisa meningkat dan bersaing dengan

negara luar. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah jika Indonesia dapat mengolah dan memanfaatkan secara optimal maka Indonesia dapat merajai eksportir migas dunia dengan begitu pendapatan Negara akan meningkat dan pendapatan perkapita juga akan stabil, seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan perkapita adalah tolak ukur dari kemajuan suatu negara, tapi kenyataannya hasil sumber daya alam khususnya migas sudah di kuasai oleh pihak asing, Pemerintah mempunyai peran penting dalam pengembangan untuk menuju kestabilan ekonomi agar Indonesia dapat sejajar dengan Negara lain khususnya Negara Singapura.

Singapura adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor. Ekonomi di Singapura mendapat peringkat sebagai negara yang paling terbuka di dunia, negara dengan angka korupsi sedikit, dan negara yang paling pro bisnis. Selain itu, Singapura juga termasuk salah satu dari Empat Macan Asia. Pajak di Singapura relatif rendah (14,2% dari PDB). Singapura juga merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia. BUMN memainkan peran besar dalam perekonomian Singapura dengan memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan terbesar di Singapura, seperti Singapore Airlines, SingTel, ST Engineering, dan MediaCorp. Investor juga sangat tertarik untuk berinvestasi di Singapura karena iklim investasi yang sangat menarik dan suhu politik yang stabil.

Barang ekspor utama di Singapura berada di sektor elektronik, bahan kimia, dan jasa. Hal itu memungkinkan untuk membeli sumber daya alam dan barang mentah yang tidak ia miliki. Air termasuk langka di Singapura. Maka dari itu, air didefinisikan sebagai sumber daya yang berharga di Singapura bersamaan dengan kelangkaan lahan yang dibantu dengan beberapa proyek reklamasi. Industri di Singapura dapat dikatakan mengandalkan konsep perantara perdagangan dengan membeli barang-barang mentah dan menyempurnakannya untuk diekspor kembali, seperti pabrik penyulingan minyak. Singapura juga memiliki pelabuhan yang strategis yang membuatnya lebih kompetitif dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Port of Singapore adalah pelabuhan kargo tersibuk kedua di dunia. Selain itu, infrastruktur pelabuhan dan tenaga kerja yang terampil, yang merupakan hasil dari kebijakan pendidikan dalam memproduksi pekerja terampil, juga menjadi aspek keberhasilan pelabuhan Singapura dalam hal ekspor dan impor.

Pemerintah Singapura mempromosikan tabungan dan investasi melalui berbagai kebijakan seperti Central Provident Fund, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan kesehatan dan pensiun warganya. Tingkat tabungan di Singapura tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia sejak tahun 1970-an. Sebagian besar perusahaan di Singapura terdaftar sebagai perseroan terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan yang melebihi jumlah modal saham mereka. Untuk mencapai kemakmuran ekonomi di abad ke-21, Singapura telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan inovasi, mendorong kewirausahaan, melatih tenaga kerja, dan menarik bakat asing. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Singapura, sehingga Singapura tetap kompetitif dan siap untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

3. Teknologi

Penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, seperti urusan bisnis, layanan kesehatan, pendidikan, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan dapat di aplikasi kan oleh lembaga legislatif yudikatif dan eksekutif atau Administrasi Publik untuk meningkatkan efisiensi internal menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis namun hal ini memiliki dampak untuk kinerja organisasi. Negara Singapura merupakan salah satu negara di kawasan regional Asia Tenggara dan menjadi negara yang sukses dalam pengimplementasian *Electronic Government*. Ditarik dari garis sejarah perkembangan *E-Government*, pemerintahan negara Singapura telah mempunyai tiga rencana dasar pengembangan elektronik government yakni; pertama adalah Program Komputerisasi Pelayanan Sipil (*Civil Service Computerization Programme*) pada tahun 1981, *National IT Plan* pada tahun 1986 dan *IT 2000* pada tahun 1992.

Dan saat ini untuk mencari situs *E-Government* negara Singapura sangat mudah, dalam mencari informasi

dan data digital dari website tersebut. Untuk portal resmi pemerintahan negara Singapura yaitu www.gov.sg dan untuk pelayanan E-Citizen www.ecitizen.gov.sg. Diantaranya pelayanan kesehatan (obat-obatan, rumah sakit, suster), *labour*, pertahanan dan keamanan, olah raga, kebudayaan, registrasi penduduk muslim untuk menikah, pajak, personal akses, kependudukan yang utama yakni setiap Parlemen, Departemen dan Kementerian terintegrasi langsung dan dapat diakses oleh warga negaranya dengan kepemilikan akun *Singpass*. Singpass adalah sebuah akun kepemilikan personal yang bisa mengakses berbagai kebutuhan masyarakatnya serta berinteraksi untuk mendapatkan berbagai pelayanan dengan seluas-luasnya (one-stop shop).

Negara Indonesia merupakan negara dengan kepulauan maritime yang cukup luas, faktor geografis ini bisa menjadi alasan utama bagi pemerintahan Indonesia mengimplmentasikan E- Government secara menyeluruh untuk menyatukan Indonesia dari Sabang hingga Marauke melalui jaringan internet yang luas. Namun terdapat beberapa kendala yang memang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat menghambat bahkan dapat terhenti, sebab fokus pemerintahan tidak lagi berprioritas pada pengimplementasian E-Government di Indonesia. Diantaranya:

- Belum di implementasikan standarisasi bagi penerapan E-Government
- Sedikitnya sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dalam mengelola E-Government
- Belum terintegrasinya data-data di setiap daerah
- Pembangunan infrastruktur yang tidak merata di setiap daerah mempersulit fokus pemerintahan Beberapa daerah di pedalaman Indonesia belum terjamah akan manfaat internet “mempertahankan tradisi leluhur”
- Dibeberapa pedalaman daerah atau desa terpencil masih terjadi “buta internet” dan tingkat “melek internet” di Indonesia belum berkembang sepenuhnya
- Kurangnya sosialisasi pemerintahan mengenai pengimplementasian E-Government beserta manfaat yang akan didapatkan
- Sulitnya regulasi dari pemerintah.

Meninjau dari situs portal pemerintahan Indonesia terdapat sedikit kesulitan dalam mencari situs website E-government Indonesia yakni www.indonesia.go.id. Didalam website portal tersebut terdapat pelayanan publik yang sangat disayangkan beberapa diantaranya tidak bisa diakses.

4. Pertahanan dan Keamanan

Struktur pertahanan Indonesia mencakup sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Setidaknya, tujuan nasional ini akan selalu sejalan dengan kepentingan nasional yang dalam Buku Putih Pertahanan Kementerian Pertahanan, kepentingan nasional adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta menjamin kelancaran pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Luas wilayah Singapura cuma 697 kilometer persegi, sedangkan Indonesia Indonesia 1.904.569 kilometer persegi. Penduduk Singapura cuma 5 juta orang, sementara Indonesia lebih dari 240 juta jiwa. Namun kekuatan militer Singapura tetap tak bisa dibanding enteng. Walau secara jumlah Indonesia lebih unggul, beberapa alutsista Singapura lebih canggih. Situs Global Fire Power menempatkan Indonesia di urutan 15, sementara Singapura di urutan 68 dunia. Soal jumlah penduduk dan jumlah personel militer, Indonesia jauh mengungguli Singapura.

Namun Singapura sudah mewajibkan warganya yang memenuhi syarat mengikuti wajib militer. Sementara Indonesia belum mengadakan program tersebut secara luas. Walau luas negaranya sangat kecil, rupanya Singapura serius membangun kekuatan daratnya. Singapur bahkan lebih dulu membeli tank kelas berat Leopard. Sementara Indonesia baru tahun ini memperkuat kavaleri dengan Leopard. Indonesia baru memborong berbagai persenjataan canggih seperti peluncur roket, artileri dan panser. Sebelumnya, sudah jadi rahasia umum peralatan perang Indonesia ketinggalan. Singapura juga unggul soal artileri dan kendaraan lapis baja. Luas wilayah laut Singapura tak seberapa. Tapi ada enam kapal selam yang menjaga perairan mereka. Sementara Indonesia kini hanya memiliki dua kapal selam. Tiga kapal selam yang dipesan dari Korea Selatan belum selesai seluruhnya. Indonesia kini berambisi membangun kekuatan udaranya. TNI

AU diperkuat sejumlah pesawat tempur baru yang menggantikan pesawat tua yang layak dimuseumkan. Pesawat itu antara lain jet tempur Sukhoi, F-16 Blok C-D, T-50 Golden Eagle dan Super Tucano. Sementara Singapura mengandalkan F-16 blok D, F-15SG dan F-5 Tiger. Mereka juga mengandalkan helikopter serbu apache untuk serangan darat.

Untuk mengukur kekuatan pertahanan, dapat dilihat bahwa kapasitas pertahanan negara dinilai dari sumber daya material yang dimiliki oleh negara untuk diubah menjadi kekuatan militer. Dalam analisa Active military manpower¹⁴ menunjukkan bahwa jumlah tentara Indonesia berdasarkan jumlah penduduk yang tersedia kurang lebih 130 juta dengan angkatan bersenjata yang aktif 435 ribu dengan demikian hanya 0,4% dari total penduduk yang aktif. Oleh karena itu, sebagai negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbanyak di dunia, Indonesia masih belum dapat menggunakan sumber daya manusianya untuk meningkatkan kemampuan militernya. Singapura memiliki sumber daya manusia yang lebih sedikit daripada Indonesia, di antara jumlah penduduk, jumlah sumber daya manusia yang tersedia adalah 1,2 juta penduduk, sedangkan untuk angkatan bersenjata yang aktif, Singapura hanya memiliki 72.000 pasukan. Dengan demikian, dari sisi jumlah SDM dan angkatan bersenjata Singapura jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Selanjutnya Machine / alat utama sistem persenjataan, merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pertahanan suatu negara, termasuk perlengkapan militer atau senjata militer / Alutsista. Dalam peringkat global yang diukur dari penguasaan senjata dan peralatan Indonesia, Indonesia menempati urutan ke-26 di dunia untuk kepemilikan senjata di darat, ke-28 untuk jumlah kapal, dan ke-34 untuk total pesawat terbang. Dilihat dari kemampuan skala darat, laut dan udara Indonesia menunjukkan bahwa TNI sangat lemah dan tidak efisien. Sebab jika melihat kondisi alutsista TNI masih harus memenuhi standard, seperti minimal basic power yang harus dipenuhi. Dari sisi jumlah pesawat, Indonesia mempunyai 441, Singapura 226, Indonesia mempunyai 418 tank, Singapura 196, Indonesia mempunyai 221 aset angkatan laut, dan Singapura 40. Perbandingan jumlah tersebut sangat jauh jika dilihat dari jumlah aset dan kepemilikan alutsista antara Indonesia dan Singapura. Terakhir adalah money atau biasa disebut anggaran pertahanan negara yang dikeluarkan oleh suatu negara. Seperti kita ketahui bersama, anggaran pertahanan Indonesia akan selalu tidak tetap, yang mempengaruhi setiap realisasi postur pertahanan.

Dibandingkan dengan Singapura yang memiliki anggaran pertahanan lebih tinggi dari Indonesia, Singapura menempati urutan ke-23, sedangkan anggaran pertahanan Indonesia menempati urutan ke-30. Saat ini, Indonesia dan Singapura telah melakukan berbagai latihan militer bersama, dan pengamanan Selat Malaka serta kawasan latihan militer (MTA) yang sudah mulai berjalan efektif di bidang pertahanan dan keamanan negara. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 21 September 1995, dimana MTA 1 terletak di Pulau Tanjung Pinang dan MTA 2 terletak di Laut Cina Selatan. Namun, perjanjian tersebut diakhiri secara sepihak oleh Indonesia pada tahun 2003 dan akan dikaji kembali karena Singapura selalu bermasalah dengan melanggar wilayah yang telah ditetapkan dalam perjanjian MTA, serta keinginan Singapura melibatkan pasukan dari negara lain yaitu Amerika Serikat dan Australia yang melakukan latihan di wilayah teritorial Indonesia. Di Bidang pertahanan dan keamanan, kerja sama meliputi pengamanan bersama di Selat Malaka, latihan militer bersama secara rutin, dan melatih tentara Indonesia untuk berangkat ke Singapura.

Berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran dan komunikasi terpenting karena memegang peranan yang sangat penting dan hampir 72% dari kapal tanker di dunia dan lebih dari 500 kapal berlayar melewati selat ini setiap harinya. Karena letaknya yang strategis, hal ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa kelompok sebagai peluang untuk memasukkan barang-barang secara illegal ke seluruh dunia dan juga menimbulkan terjadinya pembajakan kapal yang sangat membahayakan kehidupan di sekitarnya. Oleh karena itu, pengamanan di sepanjang Selat Malaka menjadi fokus perhatian negara-negara yang dilewatinya. Negara-negara tersebut mengadakan patroli bertajuk "Malsindo Trilateral Coordinated Patrol" di Batam pada tanggal 20 Juli 2004 yang dikoordinir oleh tiga negara antara Malaysia-Singapura-Indonesia.

B. Perbandingan E-Governance antara Indonesia dan Singapura

E-Government menjadi bagian yang dapat menunjang bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya Indonesia. Seiring dengan perkembangan E-Government di berbagai sektor kenegaraan, lebih luasnya setiap negara di dunia berlomba dalam mengimplementasikan E-Government. Dengan data diatas dapat di temukan bahwa adanya kesamaan regional yakni di kawasan Asia Tenggara, namun faktanya tidak semua regional dapat berkembang berdampingan pada tingkat yang setara karena semua itu memerlukan waktu, pembiayaan infrastruktur yang tidak sedikit, sumber daya manusia, keterbukaan masyarakat akan adanya jaringan internet, dan pokoknya kebutuhan pelayanan untuk masyarakat atau warga negaranya (E-Citizen) pun berbeda dan kewenangan serta konsistensi pemerintahan pasti berbeda dengan setiap negaranya.

1. Analisa E-Governance Negara Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara dengan kepulauan maritime yang cukup luas, faktor geografis ini bisa menjadi alasan utama bagi pemerintahan Indonesia mengimplmentasikan E- Government secara menyeluruh untuk menyatukan Indonesia dari Sabang hingga Marauke melalui jaringan internet yang luas. Namun terdapat beberapa kendala yang memang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat menghambat bahkan dapat terhenti, sebab fokus pemerintahan tidak lagi berprioritas pada pengimplementasian E-Government di Indonesia. Diantaranya:

- Belum di implementasikan standarisasi bagi penerapan E-Government
- Sedikitnya sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dalam mengelola E-Government
- Belum terintegrasinya data-data di setiap daerah
- Pembangunan infrastruktur yang tidak merata di setiap daerah mempersulit fokus pemerintahan
- Beberapa daerah di pedalaman Indonesia belum terjamah akan manfaat internet “mempertahankan tradisi leluhur”
- Dibeberapa pedalaman daerah atau desa terpencil masih terjadi “buta internet” dan tingkat “melek internet” di Indonesia belum berkembang sepenuhnya
- Kurangnya sosialisasi pemerintahan mengenai pengimplementasian E-Government beserta manfaat yang akan didapatkan
- Sulitnya regulasi dari pemerintah.

Meninjau dari situs portal pemerintahan Indonesia terdapat sedikit kesulitan dalam mencari situs website E-government Indonesia yakni www.indonesia.go.id. Didalam website portal tersebut terdapat pelayanan publik yang sangat disayangkan beberapa diantaranya tidak bisa diakses.

2. Analisa E-Governance Negara Singapura

Negara Singapura merupakan salah satu negara di kawasan regional Asia Tenggara dan menjadi negara yang sukses dalam pengimplementasian Electronik Government. Ditarik dari garis sejarah perkembangan E-Government, pemerintahan negara Singapura telah mempunyai tiga rencana dasar pengembangan elektronik government yakni; pertama adalah Program Komputerisasi Pelayanan Sipil (Civil Service Computeritation Programme) pada tahun 1981, National IT Plan pada tahun 1986 dan IT 2000 pada tahun 1992. Dan saat ini untuk mencari situs E-Government negara Singapura sangat mudah, dalam mencari informasi dan data digital dari website tersebut. Untuk portal resmi pemerintahan negara Singapura yaitu www.gov.sg dan untuk pelayanan E- Citizen www.ecitizen.gov.sg. Diantaranya pelayanan kesehatan (obat-obatan, rumah sakit, suster), *labour*, pertahanan dan keamanan, olah raga, kebudayaan, registarsi penduduk muslim untuk menikah, pajak, personal akses, kependudukan yang utama yakni setiap Parlemen, Departemen dan Kementerian terintegrasi langsung dan dapat diakses oleh warga negaranya

dengan kepemilikan akun *Singpass*. *Singpass* adalah sebuah akun kepemilikan personal yang bisa mengakses berbagai kebutuhan masyarakatnya serta berinteraksi untuk mendapatkan berbagai pelayanan dengan seluas-luasnya (one-stop shop).

3. Perbandingan E-Citizen Negara Indonesia – Singapura

- Pengintegrasian Data

Mengenai pengintegrasian data, tidak diragukan bahwa negara Singapura memiliki integrasi data yang luar biasa, seluruh fasilitas publik yang tersedia sudah terhubung pada satu website tanpa harus menjelajah atau *Searching* yakni <http://www.ecitizen.gov.sg>. Meskipun begitu negara Indonesia juga memiliki inisiatif dalam mengintegrasikan data dalam satu website.

Dari penjelasan di atas bahkan perlu adanya inisiatif kolektif dalam integrasi data secara menyeluruh, maka dari itu pemerintahan pusat seharusnya mendukung sepenuhnya mengenai hal tersebut.

- Fitur Pelayanan

Dalam hal pelayanan kepada warga negaranya negara Singapura telah maju dan menjadi negara terdepan di Asia Tenggara, karenanya fitur yang disediakan kepada warga negara sangat banyak dan dikatakan dapat terintegrasi langsung oleh pemerintahan. Disadari bahwa semakin berkembangnya suatu negara maka kebutuhannya pun akan bertambah berbanding lurus dengan tuntutan pemenuhan bagi warga negaranya pun semakin meningkat. Inilah tanggung jawab yang harus di pegang teguh oleh pemerintahan. Negara Indonesia harus mengimplikasikan tanggung jawab ataupun kewajiban pemenuhan kepada warga negara Indonesia.

Dilihat dari situs portal pemerintahan negara Indonesia masih banyak kekurangan dalam hal pelayanan bagi warga negaranya. Diantaranya:

1. Data kependudukan yang terbaharukan
2. Ketersediaan ruangan dalam rumah sakit bagi warga negara
3. Ketersediaan dan harga pasar nasional
4. Belum adanya sebuah kartu ataupun akun yang dapat digunakan untuk setiap warga negaranya mengakses dan berinteraksi langsung dengan pemerintahan melalui Electronic Government atau E-Citizen
5. Pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran, air dan bisnis yang masih sedikit bahkan kurang informasi.

- Pelayanan Sektor Pariwisata

Dalam segala kekurangan, negara Indonesia sepatutnya harus bersyukur dan mencintai bangsadan tanah airnya karena dengan adanya situs website Pesona Indonesia (www.indonesia.travel)

Membuat eksistensi Indonesia dimata dunia tidak hilang, melalui situs portal tersebut negara Indonesia dapat mempromosikan berbagai potensi dibidang pariwisata.

Sumber: <http://www.pesona.indonesia.travel>

Di portal www.indonesia.go.id sudah terintegrasi pada website Pesona Indonesia, namun masih sedikit potensi atau tempat yang belum di *up-date* berbagai keindahan yang lainnya. Kemudian dalam hal sarana dan prasarana Website Pesona Indonesia telah bekerjasama dengan Kereta Api Indonesia, Garuda Indonesia, PT Peln Persero. Untuk di negara Singapura sendiri memiliki website yang langsung terkoneksi dengan pemerintahan negara Singapura, namun disadari bahwa objek wisata di negara Singapura lebih sedikit di bandingkan dengan segala kekayaan pariwisata di Indonesia. Untuk hal ini pemerintahan Indonesia harusnya mengeksplorasi lebih dalam mengenai kepariwisataan di Indonesia dan

mengembangkannya melalui promosi secara online dan terintegrasi melalui Electronic Government.

- **Komitmen dalam Pembangunan dan Pengembangan E-Government**

Sangat disadari bahwa kesiapan, pelaksanaan, pengembangan, pembangunan dan implementasi langsung bukanlah hal instan. Pengimplementasian E-Government tidaklah mudah memerlukan waktu yang relatif lama dan perlu adanya ketetapan ataupun tanggungjawab yang besar terkait ini. Di dalam sejarah E-Government negara Indonesia tidaklah sebanding dengan negara Singapura yang hampir menginjak dalam fase dewasa dalam pengembangan dan implementasi E-Government. Pendapat Washtenaw Country mengenai Tahap Inisiatif E-Government ; membagi inisiatif E-Government yang ada menjadi tiga tahapan besar, yaitu : e- Information, e-Commerce dan e-Democracy (Kinney, 2001)[4].

Diambil analisa dari pendapat diatas bahwa negara Singapura telah mencapai tahap besar dalam fase E-Democracy, ditandai dengan adanya sebuah aktivitas dalam website pemerintahan negara Singapura terkait peningkatan demokrasi ataupun perwujudan dari demokrasi di negara Singapura. Dan di negara Indonesia sendiri dari sudut pandang penulis, berada di fase atau tahap inisiatif E-Information. Dalam tahap ini pembangunan infrastruktur utama dan pendukung dari E-Government harus memiliki visi dan misi yang berdampak tanpa adanya kepentingan lain, dikaitkan dengan pengembangan E-Government di Indonesia, biasanya masih terdapat kendala yang akan terjadi dalam pengembangan website seperti beberapa portal tidak data memuat data, tidak terakses ataupun server portal utamanya tidak dapat di buka. Kemudian sifat portal sebagai website masih berupa menginformasikan dan transferring data pelayanan sederhana atau sederhananya disebut pelayanan satu arah, karena tidak adanya *feedback* bagi pemerintahan.

- **Konsistensi Aparatur atau Pihak Terlibat**

Meskipun telah banyak dikeluarkan sumber hukum mengenai penerapan E-Government namun realitasnya penerapan E-Government cenderung statis dan tidak banyak mengalami perubahan perihal konsistensi ketetapan hukum, regulasi dan sumber daya manusia (SDM). Dan mengenai portal website negara Indonesia sendiri, analisa penulis bahwa website sebagian pemerintahan daerah (Provinsi/kabupaten) lebih baik dari pada portal website utama negara Indonesia, misalnya untuk kota Semarang (www.semarangkota.go.id).

Dalam hal sumber daya manusia, tidak dipungkiri bahwa banyak potensi-potensi yang dimiliki bangsa Indonesia terkait SDM bagi mengembangkan E-Government. Diantara puluhan juta manusia sebagai warga negara Indonesia, dari sekian banyak itu diantaranya mau ataupun rela dirinya menjadi SDM yang berpotensi demi mengembangkan negara Indonesia di bidang pengimplementasian E-Government. Maka dari itu bagi pemerintah atau pihak terkait ini, janganlah menutup mata pada pihak mana pun, seperti ; mahasiswa atau mahasiswi (negeri/swasta), aparatur non pemerintahan, pihak swasta dan bisnis ataupun pihak lain yang ikutserta dalam pengimplementasian Electronic Government di Indonesia.

Disisi lain, pemerintahan negara Singapura telah meninggalkan negara Indonesia cukup jauh. Tidak hanya mengenai garis waktu pengimplementasian E-Government yang terlampau jauh, aparatur terkait dapat mengintegrasikan dirinya kepada pemerintahan, terlebih warga negara ataupun penduduk di negara Singapura ikut serta mendukung pengembangan dan kinerja pemerintahan.

- **Keamanan dan Privasi**

Telah di sebutkan bahwa pelayanan E-Citizen pemerintahan negara Singapura di tujukan bagipelayanan yang seluas-luasnya untuk setiap warga negara dan penduduknya (one-stop shop), tetapi tidak membuat pemerintahan negara Singapura mengesampingkan keamanan dan privasi setiap warga negaranya.

Terbukti dengan page *SINGPASS* dalam website www.ecitizen.gov.sg dalam *citizen connect*, telah disediakan untuk data personal, akses pelayanan lainnya dan interaksi dengan pemerintah negara Singapura dan dapat terkoneksi dengan E-mail. Dan apabila kita mengecek dan mengunjungi situs webstite E-government ataupun E-Citizen tidak ditemukan hal-hal yang dapat merusak citra pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan negara Singapura. Di situs portal negara indonesia belum di aplikasikan pelayanan

berbentuk data personal sebagai log in akses ataupun privasi bagi warga negara Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk Republik, terletak dikawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luasdaratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Sedangkan Singapura adalah negara kecil dan jumlah warganya sedikit. Populasi 2021 hanya sekitar 5,9 juta. Bandingkan dengan Malaysia sekitar 33,9 juta dan Indonesia sekitar 275,5 juta. Luas Singapura hanya 782,6 kilometer persegi (km²), hanya sedikit lebih luas dari DKI Jakarta yang sekitar 661,5 km². Jika dibandingkan dengan Indonesia yang luasnya sekitar 1,9 jutakm², Singapura seolah hanya noktah kecil. Mengurus negara yang sangat kecil dengan jumlah rakyat sedikit pasti jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengurus Indonesia yang sangat luas dan jumlah rakyatnya nomor empat paling banyak sedunia.

Indonesia dan Singapura adalah negara yang berdekatan. Keduanya merupakan negara demokratis dan sama-sama menganut sistem multi partai. Meskipun memiliki kesamaan dalam sistem kepartaian, tingkat korupsi di Indonesia dan Singapura sangatlah kontras. Salah satu faktor penyebabnya adalah Singapura memiliki sistem dan aturan jelas yang mengatur dana partai politik. ingapura dan juga Indonesia merupakan negara kesatuan. Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki banyak partai yang sistem pemerintahannya parlementer dan bentuk pemerintahan Republik. Indonesia adalah negara yang menganut pemisahan kekuasaan yang dipengaruhi oleh Jhon locke. Jhon locke mengemukakan tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif yang mana disebut dengan trias politika. Trias politika adalah sebuah prinsip bahwa kekuasaan sebagiknya tidak diserahkan terhadap orang yang sama agar mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Perekonomian Negara Indonesia dan Negara Singapura perbedaanya cukup tinggi, Negara Indonesia wilayahnya lebih luas dibandingkan Negara Singapura sebenarnya dengan hal ini Indonesi bisa lebih maju daripada Singapura. Indonesia dapat memaksimalkan berbagai macam sector yang dimiliki, khususnya pada sector pertanian seperti julukannya Indonesia adalah Negara agraris, seharusnya hasil output dari sector pertanian dapat di ekspor di berbagai Negara namun kenyataanya Indonesia tetap memilih jalan import untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Singapura adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor.

Dalam hal teknologi egera Singapura merupakan salah satu negara di kawasan regional Asia Tenggara dan menjadi negara yang sukses dalam pengimplementasian Electronic Government. Ditarik dari garis sejarah perkembangan E-Government, pemerintahan negara Singapura telah mempunyai tiga rencana dasar pengembangan elektronik government yakni; pertama adalah Program Komputerisasi Pelayanan Sipil (Civil Service Computeritation Programme) pada tahun 1981, National IT Plan pada tahun 1986 dan IT 2000 pada tahun 1992. Negara Indonesia merupakan negara dengan kepulauan maritime yang cukup luas, faktor geografis ini bisa menjadi alasan utama bagi pemerintahan Indonesia mengimplmentasikan E-Government secara menyeluruh untuk menyatukan Indonesia dari Sabang hingga Marauke melalui jaringan internet yang luas. Namun terdapat beberapa kendala yang memang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat menghambat bahkan dapat terhenti, sebab fokus pemerintahan tidak lagi berprioritas pada pengimplementasian E-Government di Indonesia. Struktur pertahanan Indonesia mencakup sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Setidaknya, tujuan nasional ini akan selalu sejalan dengan kepentingan nasional yang dalam Buku Putih Pertahanan Kementerian Pertahanan, kepentingan nasional adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, serta menjamin kelancaran pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Daftar Pustaka

- Al Arifin, S. M. H. (2022). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura. Perpustakaan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amaliya, U. (2011). E-Commerce di Singapura dan Indonesia: Sebuah Perbandingan Kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Grasia Kurniati, S. H. (2016). Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 1(2)*, 201-234.
- Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia. *Recidive, 2(3)*.
- Kurniawan, B., & Simanjuntak, M. R. (2019, October). Perbandingan Persyaratan Green Building di Indonesia dan Singapura. In *TECHNOPEX 2019*.
- Prawira, B. (2014). *Studi Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam pemutusan hubungan Kerja (PHK) di Negara Indonesia dan Singapura* (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam).

Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Sebagai Rekayasa Sosial Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya

Inge Adellia¹, Manda Ayu Febrianti², Siti Nurhaliza Maulida³

¹Universitas Hang Tuah Surabaya

²Universitas Hang Tuah Surabaya

³Universitas Hang Tuah Surabaya

*Corresponding author: ingeadelya11@gmail.com¹, mandaayuf02@gmail.com², sitinurhalizamaulida1@gmail.com³

Abstrak

Peredaran dan penggunaan narkoba menjadi permasalahan serius yang dialami oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia. Bahkan kasus ini sudah menjadi fenomena sosial yang perlu perhatian khusus dari pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat. Dalam penanganan narkotika pemerintah menciptakan rekayasa Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai usaha melawan penyalahgunaan obat terlarang khususnya wilayah Surabaya. Walikota Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2014. Berdasarkan pengesahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pengimplementasian regulasi P4GN dalam menangani penyalahgunaan narkoba khususnya di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian berupa teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dan teori sosial makro dari Thomas Hobbes. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan P4GN sebagai bentuk rekayasa sosial dalam memberantas narkoba di Surabaya belum sepenuhnya berhasil karena standar/ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasi dengan baik karena kasus narkoba terus meningkat, akan tetapi BNN Surabaya telah memiliki SDM berkompeten dan profesional. Serta kondisi lingkungan sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat kurang peduli akan bahaya narkoba dan juga dari keterkaitan implementasi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mengakibatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih ada di Kota Surabaya.

Kata kunci: *Implementasi, Narkoba, Rekayasa Sosial, P4GN*

Abstract

Drug circulation and use are serious problems experienced by several countries, one of which is Indonesia. In fact, this case has become a social phenomenon that needs special attention from the government and all levels of society. In handling narcotics, the government created the engineering of the Prevention of Eradication of Drug Abuse and Illicit Circulation (P4GN) as an effort to fight illegal drug abuse, especially the Surabaya area. The Mayor of Surabaya City issued Mayor Regulation Number 65 of 2014. Based on this ratification, this study aims to explore how to implement P4GN regulations in dealing with drug abuse, especially in Surabaya. The method used in this study is descriptive using a qualitative approach with the focus of research in the form of policy implementation theory by Van Meter and Van Horn (1975) and macrosocial theory from Thomas Hobbes. The data collection technique used is by literature study. The results showed that the P4GN policy as a form of social engineering in eradicating drugs in Surabaya has not been fully successful because the standards/measures and policy objectives have not been well realized because drug cases continue to increase, but BNN Surabaya already has competent and professional human resources. As well as the condition of the social environment shown by the community is less concerned about the dangers of drugs and also from the relationship of implementation with the economic conditions of the community which results in drug circulation and abuse still exists in the city of Surabaya.

Keywords: *Implementation, Drugs, Social Engineering, P4GN*

Pendahuluan

Peredaran dan penggunaan narkoba menjadi permasalahan serius yang dialami oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia. Bahkan kasus ini sudah menjadi fenomena sosial yang perlu perhatian khusus dari pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat. Peredaran maupun penyalahgunaan narkoba merupakan narkoba merupakan salah satu masalah serius, sehingga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Bukan hanya menjadi negara transit, Indonesia justru menjadi pasar besar bagi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan harga yang tidak terjangkau “*great market, great price*” (Pramingtyas, 2015).

Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan sasaran yang berpotensi sebagai tempat peredaran narkoba secara ilegal. Hampir di seluruh wilayah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Hariyanto, 2018). Peredaran narkoba dilakukan secara kelompok bahkan melibatkan sebuah organisasi. Peredaran narkoba juga telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia karena tingginya permintaan dari pengguna narkoba di Indonesia mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkotika dimana tidak diperuntukkan untuk pengobatan melainkan digunakan sebagai karena ingin menikmati pengaruhnya (Widayati & Winanto, 2021). Pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak terkait dan dapat dikatakan menentang aturan. Peredaran narkoba di Indonesia tidak lagi mengenal strata sosial dan dapat terjadi pada siapapun dan bisa dilakukan dimanapun dengan bermacam alasan yang menyebabkan pelaku menggunakan narkotika. Dengan adanya permasalahan tersebut mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi dengan adanya pengesahan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisi terkait Narkotika. Dalam regulasi tersebut juga diatur peran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dijadikan sebagai lembaga Pemerintah diluar Kementrian.

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia membuktikan adanya peningkatan peredaran dan penggunaan narkoba setiap tahunnya di Indonesia.

Tabel 1 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka (orang)
2019	40.756	52.709
2020	45.231	58.764

Sumber: PPDIN BNN, 2002 data diolah (Nurmalita & Megawati, 2022)

Berdasarkan data pada tabel 1, perkembangan penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sehingga pemerintah berupaya menangani permasalahan ini sesuai Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024. Diharapkan dengan pengesahan peraturan tersebut dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi operasional BNN dalam mengatasi permasalahan tingkat nasional.

Dikutip dari (Nurmalita & Megawati, 2022) Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua pada triwulan 1 2021 dengan jumlah 1.910 kasus dan 2.346 tersangka (PPID BNN, 2021). Berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur tahun 2019 sebanyak 2,50% atau 11.038.953 penduduk Jawa Timur pernah menggunakan narkoba. Sedangkan 1,30% atau sekitar 554.108 penduduk Jawa Timur menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir, dengan umur pertama kali menggunakan narkoba sekitar 17-19 tahun dan sebagian besar pengguna narkoba berusia 35-44 tahun (PPID BNN, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur memiliki jumlah pengguna yang tinggi dan didukung dengan data sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Timur

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka (orang)
2019	4.674	5.701
2020	6.193	7.661

Sumber: PPDIN BNN, 2002 data diolah (Nurmalita & Megawati, 2022)

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Tiga daerah di Jawa Timur memiliki prevalensi tertinggi yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Madura. Dengan alasan tersebut membuat Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2014-2015. Intruksi tersebut berisi “Pemberantasan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan pemantauan gerakan orang atau kelompok pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui penyusunan peta kerawanan dan alur peredaran narkoba serta melakukan operasi pemeriksaan dan pemantauan secara acak. Hal tersebut dilakukan dengan cara penindakan pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan cerdas dan berwibawa”. Tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai mewujudkan upaya “Membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dan seluruh warga Surabaya agar terhindar dan pulih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

P4GN adalah singkatan dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha untuk menghindarkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Memberantas peredaran gelap dan illegal trading narkoba ini secara tuntas dan menyeluruh (Perwali Surabaya Nomor 65 Tahun, 2014). Regulasi P4GN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 Pasal 2 yang menyatakan bahwa BNN berperan dalam pencegahan, menanggulangi distribusi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan bahan dasar produksi narkotika, salah satu tugasnya adalah melakukan pemberantasan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya memiliki kewajiban, yaitu : melaksanakan penyangkalan dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat terkait adanya bahaya narkoba, pemberdayaan masyarakat tentang bahaya narkoba di lingkup keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat sekitar melalui sosialisasi atau pembinaan, melakukan penanganan dan pengobatan terhadap para pengguna narkoba, serta memberantasnya melalui penyelidikan dan penyidikan (Nurmalita & Megawati, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dijumpai oleh peneliti, menyebabkan peneliti untuk menggali dan memahami lebih lanjut mengenai implemementasi dari regulasi P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bentuk implementasi kebijakan P4GN sebagai bentuk rekayasa sosial dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Dalam penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan tentang kebijakan publik khususnya kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai rekayasa sosial dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya bersama dengan BNN. Peneliti memberikan pembatasan dalam analisis ini berupa ruang lingkup wilayah yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya bidang pemberantasan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai rekayasa sosial dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai rekayasa sosial dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya?

Diharapkan dengan adanya penelitian yang nantinya dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Untuk mengembangkan pengetahuan tentang kebijakan publik khususnya kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.
2. Manfaat Praktis
Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

Kebijakan publik merupakan regulasi yang berlangsung secara luas, sehingga secara umum lembaga yang berwenang membuat kebijakan yang berlaku adalah pemerintah. Hal ini menjadikan kebijakan publik sebagai ketetapan yang menggambarkan sikap pemerintah dalam mengatasi suatu masalah serta tindakan yang telah atau sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah yang bertujuan sebagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Serta tindakan yang telah atau sedang diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan yang diberikan oleh mereka apa yang sedang terjadi (atau tidak terjadi). Pernyataan ini diungkat oleh Wilson (Wahab, 2012).

Implementasi kebijakan menurut Marilee S. Grindle (1980) dalam (Subianto, 2020:18) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Proses implementasi akan dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, serta dana telah disiapkan dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Subianto, 2020:18) memberikan pengertian implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kebijakan implementasi yaitu sebuah aktivitas yang nyata dilakukan setelah keluarnya arahan pengesahan oleh suatu kebijakan yang mengandung dasar pengelolaan input agar menghasilkan outcomes/output bagi publik. Tahap-tahap kebijakan dalam implementasi memiliki ciri serta yang dapat membedakan tahap dalam pembuatan suatu kebijakan. Adanya pembuatan kebijakan proses yang mempunyai logika bottom up berarti proses awal kebijakan menyampaikan dukungan, aspirasi masyarakat. Sedangkan ada sisi lain logika top down yaitu penurunan kebijakan alternatif atau abstrak menjadi tindak konkrit/mikro.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Subianto, 2020) teorinya berawal dari argumentasi bahwa perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi serta suatu model konseptual yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja (performance) berdasarkan pandangan tersebut. Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Wahab, 2012:165) menyatakan bahwa terdapat sebanyak enam variabel yang menjadi faktor kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kemudahan dalam implementasi regulasi dapat dinyatakan berhasil atau tidaknya apabila standar/ukuran dan sasaran dari regulasi tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat pada tingkat implementasi kebijakan.
2. Sumber Daya
Keberhasilan atas realisasi suatu regulasi bisa dilihat melalui seberapa efektifitasnya menggunakan kemampuan dan fasilitas yang tersedia. Dari segi sumber daya manusia maupun pendukung lainnya.

Jika sumber daya yang dimiliki sangat terampil, maka peluang kesuksesan dalam merealisasikan suatu kebijakan menjadi lebih tinggi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam karakteristik agen pelaksana terdapat beberapa susunan, diantaranya yaitu: struktur birokrasi, norma, dan bentuk relasi yang terjadi dalam pemerintahan.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition)

Para Pelaksana Sikap atau kecenderungan merupakan pola pikir dan karakter (sikap) yang lekat dengan para pelaksana kebijakan seperti sikap tanggung jawab, jujur, dan demokratis.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam merealisasikan regulasi yaitu adanya komunikasi yang baik antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Suatu variabel dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dapat dilihat melalui sejauh mana kepentingan dalam kelompok mampu berkontribusi dalam mendukung, bagaimana sikap opini publik yang ada dilingkungan, serta elit tidaknya politik dalam memberikan dukungan terhadap adanya implementasi kebijakan tersebut.

Dikutip dari (Kencana, dkk., 2016) kebijakan merupakan suatu rekayasa sosial (social engineering). Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan dirumuskan oleh pemerintah untuk kepentingan banyak orang. Suatu kebijakan ataupun rekayasa sosial akan terbentuk sesuai dengan fenomena sosial yang sedang terjadi. Fenomena sosial yang terjadi merupakan bentuk formulasi kebijakan sebagai arfisal bukan permasalahan pokoknya, sehingga seringkali kebijakan tidak menyelesaikan permasalahan, bahkan sebuah kebijakan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Dalam proses pembentukan rekayasa sosial sebagai solusi atas fenomena sosial yang sedang terjadi khususnya di Indonesia, dibutuhkan sebuah teori sosial. Teori sosial yang digunakan peneliti adalah teoritis sosial makro. Beberapa teori sosial makro diantaranya:

A. Teori Aristoteles

Aristoteles (384-322 SM) berpandangan bahwa civil society dipahami sebagai sebuah sistem kenegaraan. Beliau menggunakan istilah koinonia politike untuk civil society yang didefinisikan sebagai sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Civil society juga digambarkan sebagai sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama didepan hukum. Hukum sendiri dianggap etos, yaitu seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (virtue) dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara.

B. Thomas Hobbes

Thomas hobbes mengatakan setiap individu merupakan makhluk rasional yang akan menggunakan segala usaha untuk memperoleh keinginannya dalam mempertahankan hidupnya. Tindakan manusia adalah gabungan rasio dari keinginan dalam bentuk nafsu dan pergerakan untuk mencapaitujuan melalui kekuasaan. Kekuasaan diperoleh melalui konflik. Manusia membutuhkan masyarakat (organisasi) sepanjang hidup. Selain itu, manusia akan membantu orang lain untuk beratahan hidup dan saling melengkapi.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian berupa teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu standar/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Pada penelitian kualitatif, data diperoleh melalui berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Menurut Zed (Sofiah, dkk., 2020) bahwa metode ini dilakukan dengan pengumpulan data pustaka, lalu dibaca dan dicatat untuk mengolah data penelitian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian studi kepustakaan tidak melakukan penelitian secara langsung di lapangan karena data yang diperoleh berasal dari buku ataupun dokumen. Menurut (Salmaa, 2023) dalam proses pengumpulan data studi literatur dibutuhkan 3 proses, yaitu:

1. Editing

Dokumen atau sumber kepustakaan yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dilakukan pengecekan kembali untuk memeriksa kelengkapan dokumen, kejelasan makna, dan keselarasan makna satu dokumen atau sumber dengan sumber lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan topik pembahasan penelitian.

2. Organizing

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian, peneliti membuat kerangka untuk mengusun hasil penelitian sesuai dengan data yang sudah terkumpul.

3. Finding

Teknik ini dibutuhkan untuk melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diorganisir. Data dianalisis lebih lanjut menggunakan kaidah-kaidah, metode, dan teori yg sesuai dengan topik penelitian. Sehingga pembahasan dan kesimpulan dapat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di awal penelitian. Hal ini sangat penting agar data yang telah terkumpul sesuai dengan 8 teori yang sudah ada sebelumnya dan valid.

Analisis data adalah proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti, serta menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data merupakan tahap yang penting dalam penelitian, karena dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Ada berbagai teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian, tergantung pada jenis data dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang umum digunakan dalam penelitian:

1. Analisis deskriptif

Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data secara ringkas dan mudah dimengerti. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, atau angka-angka statistik seperti rata-rata, median, atau modus (Sugiyono, 2014).

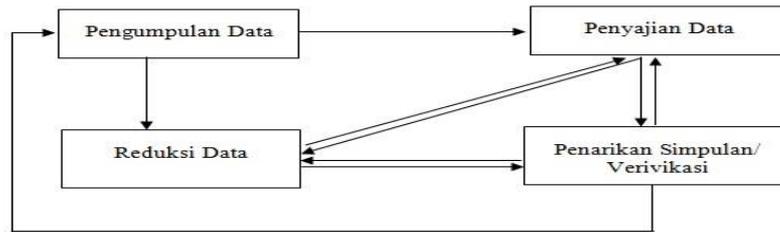
2. Analisis inferensial

Teknik analisis ini digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi berdasarkan data sampel yang diambil (Sugiyono, 2018).

3. Analisis kualitatif

Teknik analisis ini digunakan untuk memahami makna, tema, atau pola dalam data yang diperoleh. Analisis kualitatif melibatkan teknik seperti analisis tematik, analisis naratif, atau grounded theory. Setelah data diolah dengan teknik analisis yang sesuai, hasil analisis diinterpretasikan agar memberikan kesimpulan yang tepat. Hasil analisis dibandingkan dengan tujuan penelitian, temuan penelitian sebelumnya, atau teori-teori yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Setelah diinterpretasikan, hasil analisis digunakan untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian.

Dari ke-tiga tipe analisis, peneliti menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang dikembangkan menjadi hipotesis. Bila berdasarkan data yang dapat yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Berikut peneliti akan memaparkan gambar terkait cara peneliti untuk melakukan analisis data menggunakan teori Miles dan Hubberman, sebagai berikut:



Sumber: Miles Hubberman (Sugiyono, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Surabaya adalah daerah dengan permintaan obat-obat terlarang atau narkoba yang tinggi dan salah satu wilayah singgah transportasi antar Sumatera, Jawa dan Bali. Hal ini berdampak pada jumlah peredaran narkoba di Kota Surabaya tinggi. Akses terbanyak peredaran narkoba yaitu dari jalur laut dan darat. Selain itu jumlah pengangguran di Kota Surabaya yang cukup besar berpengaruh pada meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena banyak masyarakat yang tergiur dengan keuntungan menjadi pengedar dan kurir narkoba.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya mendorong pemerintahannya untuk menerbitkan regulasi berupa Peraturan Walikota Surabaya dengan Nomor 65 Tahun 2014 mengenai Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2014-2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa target dari strategi dalam pemberantasan yaitu seluruh lapisan masyarakat khususnya mulai dari pengedar hingga pengguna.

Kebijakan P4GN sebagai Rekayasa Sosial (Social Engineering)

Dikutip dari (Kencana, dkk., 2016) menyatakan kebijakan merupakan suatu rekayasa sosial (social engineering). Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan dirumuskan oleh pemerintah untuk kepentingan banyak orang. Suatu kebijakan ataupun rekayasa sosial akan terbentuk sesuai dengan fenomena sosial yang sedang terjadi. Fenomena sosial yang terjadi merupakan bentuk formulasi kebijakan sebagai arifal bukan permasalahan pokonya, sehingga seringkali kebijakan tidak menyelesaikan permasalahan, bahkan sebuah kebijakan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Dikutip dari (Nurmalita & Megawati, 2022) terdapat enam aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan yang sesuai dengan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn, yaitu :

1. Standar / Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Pada hasil penelitian ini implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh BNNK Surabaya dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, karena tindak pidana narkoba di Surabaya masih terus mengalami peningkatan.
2. Sumber Daya
Pada variabel sumber daya, implementasi kebijakan P4GN dapat dikatakan berhasil karena memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemberantasan serta dari sumber daya finansial sudah digunakan sebagai mestinya dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
BNN Kota Surabaya mendukung adanya kebijakan P4GN dengan memiliki komitmen atau konsistensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan aparatur dalam instansi memiliki relasi yang baik dan mampu bekerja sama dalam pelaksanaan implementasi P4GN guna memerangi bahaya narkoba.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
Sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana baik dari penerimaan maupun penolakan akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan. Dalam kebijakan P4GN khususnya di seksi pemberantasan ini para pelaksana kebijakan tersebut mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan PERKA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 dan PERWALI Nomor 65 Tahun 2014 dan Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan dengan memberikan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian dukungan dari pemerintah pusat berupa alokasi dana untuk pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN. Pada variable ini dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.
5. Komunikasi antar Organisasi
Proses pengimplementasian regulasi P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba pihak BNNK surabaya telah melakukan komunikasi dengan mengajak masyarakat untuk melakukan kerjasama dan mengajak pihak yang terkait dalam proses mengimplementasikan kebijakan P4GN. Pada variabel komunikasi antar organisasi ini dapat dinyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan BNNK Surabaya dengan instansi pemerintah daerah maupun masyarakat dikatakan berhasil atau memiliki komunikasi yang baik guna memberantas penyalahgunaan narkoba di kota Surabaya.
6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Kondisi sosial masyarakat di Kota Surabaya dirasa kurang memiliki kepedulian akan bahaya narkoba di lingkungan sekitarnya dibuktikan dengan masih banyaknya distribusi dan penyalahgunaan narkoba di Surabaya. Kondisi lingkungan ekonomi dari pemerintah pusat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kota Surabaya dikarenakan segala pemberian anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kewajiban dari BNN Kota Surabaya dibebankan kepada APBN. Pada Variable lingkup keadaan masyarakat,ekonomi,politik dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan P4GN masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti kondisi sosial di masyarakat kurang peduli akan bahaya narkoba serta kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi alasan utama penyalahgunaan narkoba.

Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi Kebijakan P4GN sebagai rekayasa sosial dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

Dari beberapa penelitian sebelumnya dengan topik yang sama mengenai implementasi kebijakan P4GN di Kota Surabaya. Peneliti dapat merumuskan beberapa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

Faktor Pendukung

1. Sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn sumber daya yang dapat dipantau yaitu sumber daya manusia dan keuangan. Pada sumber daya ini baik SDM maupun sumber daya keuangan dapat dikatakan berhasil karena BNNK Surabaya memiliki SDM yang kompeten dan profesional dibidangnya khususnya bidang pemberantasan. Begitu juga dengan sumber daya keuangan yang berasal dari APBN digunakan untuk pelaksanaan kebijakan P4GN seperti penyuluhan, pelatihan pengembangan kualitas dan kapasitas terutama bagi penyidik.
2. Sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn terkait karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan P4GN yang terdiri dari Pemerintah Kota Surabaya, BNNK Surabaya dan masyarakat. Hubungan antar aparatur dalam instansi memiliki relasi dan mampu bekerja sama dengan baik dalam menjalankan P4GN guna memerangi bahaya narkoba.
3. Sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn terkait sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana dapat dikatakan menerima dan mendukung hak tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dari pemahaman BNNK Surabaya terhadap kebijakan P4GN sehingga dapat melaksanakan kewajiban

yang sesuai. Dukungan sarana dan prasarana merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan implementasi regulasi P4GN.

4. Sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn terkait dengan komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan P4GN dapat dikatakan berhasil karena pihak BNNK Surabaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Serta BNNK Surabaya juga melakukan komunikasi dengan cara kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah terkait pengawasan terhadap orang asing.

Faktor Penghambat

1. Takaran dan tolak ukur dari pengimplementasian regulasi P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena dalam ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasi dengan baik tetapi dalam target pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan berhasil karena melebihi target yang ditentukan.
2. Sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn terkait lingkup keadaan masyarakat, keuangan, dan pemerintahan. Pada variabel keadaan masyarakat sangat berpengaruh dalam kesuksesan terlaksananya implementasi regulasi karena informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu penanganan lebih awal terhadap tindak pidana narkoba. Akan tetapi masih didapati kurang pedulinya masyarakat dan sikap keberanian untuk melaporkan tindak pidana narkoba sehingga penyalahgunaan narkoba di Surabaya masih ada hingga sekarang.

Diskusi

Rekayasa sosial (social engineering) adalah campur tangan gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Rekayasa sosial merupakan sebuah jalan mencapai sebuah perubahan sosial secara terencana. Banyaknya penyalahgunaan narkoba di era sekarang ini sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Kota Surabaya merupakan daerah dengan permintaan narkoba yang tinggi dan merupakan wilayah singgah transportasi antar Sumatera, Jawa dan Bali hal inilah yang menyebabkan tingginya jumlah peredaran narkoba di Surabaya. Akses masuk peredaran narkoba terbanyak dari jalur laut dan darat serta jumlah pengangguran di Kota Surabaya cukup besar sehingga meningkatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena banyak masyarakat yang tergiur dengan keuntungan menjadi pengedar (agen) dan kurir narkoba.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya mendorong pemerintahannya untuk menerbitkan regulasi berupa Peraturan Walikota Surabaya dengan Nomor 65 Tahun 2014 mengenai Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2014-2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa target dari strategi dalam pemberantasan yaitu seluruh lapisan masyarakat khususnya mulai dari pengedar hingga pengguna.

Dari hasil penelitian ini, mampu menjelaskan mengenai bagaimana pengimplementasian dari Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Surabaya. Untuk memperjelas pengimplementasian regulasi tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan Teori dari Thomas Hobbes.

Thomas hobbes mengatakan setiap individu merupakan makhluk rasional yang akan menggunakan segala usaha untuk memperoleh keinginannya dalam mempertahankan hidupnya. Tindakan manusia adalah gabungan rasio dari keinginan dalam bentuk nafsu dan pergerakan untuk mencapaitujuan melalui kekuasaan. Kekuasaan diperoleh melalui konflik. Manusia membutuhkan masyarakat (organisasi) sepanjang hidup. Selain itu, manusia akan membantu orang lain untuk bertahan hidup dan saling melengkapi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba Di Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik dan berhasil walaupun masih ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan implementasi. Takaran dan tolak ukur dari pengimplementasian regulasi P4GN dalam memberantas narkoba belum sepenuhnya berhasil karena dalam ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasi dengan baik tetapi dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan berhasil karena melebihi target yang ditentukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan di atas, masukan yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Kepolisian di harapkan lebih optimal lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba sehingga standar/ukuran dan tujuan kebijakan P4GN dapat terealisasi dengan baik.
2. Pihak BNNK Surabaya lebih intensif melakukan penyuluhan guna pencegahan penyalahgunaan narkoba dan memberi tahu kepada masyarakat supaya lebih berani dalam pelaporan jika terjadi indikasi tindak pidana narkoba
3. Diharapkan masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar akan bahaya narkoba dan tindak pidana narkoba.

Daftar Pustaka

- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1*(ISSN: 2614-560x).
- Kencana, Surya, A., & Haryono, N. (2016). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya*.
- Nurmalita, A., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya. *Publika, 10*, 1111–1122.
- Perwali Surabaya Nomor 65 Tahun*. (2014).
- Praminingtyas, S. D. (2015). *Manajemen Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi pada Implementasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)*. <http://beritajatim.com>,
- Salmaa. (2023). *Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya*. <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>
- Sofiah, R., Suhartono, & Hidayah, ratna. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (STM) sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 7, No. 1*. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/pedagogi>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. PT Menuju Insan Cemerlang. https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/Kebijakan%20Publik_151220_opt.pdf?sequence=3
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. CV Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Widayati, & Winanto. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkoba sebagai Upaya Preventif Peredaran dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang) Widayati. In 24 | *International Journal of Law Society Services* (Vol. 1, Issue 1). <https://www.radioidola.com/2020/awal-tahun-polrestabes-semarang-ungkap-tiga-kasus-peredaran->

Kualitas Pelayanan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe (Bmw) Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Anindita Fitrianti¹, Dr. Lukman Arif, M. Si²

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat e-mail : aninditafitrianti3527@gmail.com

*Corresponding author : ariflukman208@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasarkan oleh fenomena penggunaan layanan Aplikasi Berkas Mlaku Dewe atau yang disingkat BMW, sebagaimana implementasi layanan aplikasi ini telah di prakarsai oleh Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengacu pada pembaruan informasi yang diperoleh dari situasi di lapangan dengan berpedoman pada teori lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman. Dalam hal ini terdapat lima sasaran kajian yaitu : (1) Tangibles (bukti fisik); (2) Reliability (kehandalan); (3) Responsiveness (Ketanggapan); (4) Assurance (jaminan dan kepastian); (5) Empathy (empati). Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1) Dari sisi tangibles (bukti fisik) dapat dinyatakan sudah cukup baik; 2) Dari sisi reliability (kehandalan) sudah sesuai prosedur pelayanan; 3) Dari sisi responsiveness (ketanggapan) sudah dilakukan dengan baik dan merespon cepat; 4) Dari sisi assurance (jaminan dan kepastian) sudah menunjukkan hasil yang cukup; 5) Dari sisi empathy (empati) sudah di katakan cukup baik dan jelas.

Kata Kunci: Berkas Mlaku Dewe, Kualias Pelayanan, Layanan Publik

Abstract

This research was based on the application service usage of Berkas Mlaku Dewe or BMW, the implementation of this application service had been established by Sub-District Sukodono Office, Sidoarjo Regency since 2015. BMW owned by Sukodono Sub-District Office Sidoarjo Regency. Based on the purpose of this study is to examine the quality of Service Based Application Berkas Mlaku Dewe (BMW) at Sukodono Sub-District office Sidoarjo Regency. This is a descriptive qualitative study using the technique of data collection namely, observation, interview, and documentation. The location of this research was conducted at Sukodono Sub-District office Sidoarjo Regency. The focus of this research is based on five-dimensional theory about service quality by Parasuraman. In this case, there are 5 research points being used, they are: (1) Tangibles; (2) Reliability; (3) Responsiveness; (4) Assurance; (5) Empathy. The study found out that, 1) The tangible point is considered as good enough; 2) The reliability has been conducted in accordance to the service procedure; 3) The responsiveness has been good; 4) The assurance has been constantly getting better according to the observation; 5) The empathy also could be concluded as good enough and clear in delivering information.

Keywords: Berkas Mlaku Dewe, Quality Service, Public Service

Pendahuluan

Salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk upaya kejahatan yang manipulatif, diperlukan kesediaan untuk membangun tatanan birokrasi yang memiliki tujuan awal dalam memperbaiki patologi (penyakit) birokrasi dari pemerintahan sebelumnya hingga untuk masa kepemimpinan pemerintahan saat ini maupun di masa kepemimpinan pemerintahan yang akan datang. Dibutuhkan perbaikan dan komitmen yang kuat dalam mengatasi permasalahan patologi (penyakit) birokrasi dari masa pemerintahan sebelumnya. Perbaikan dan komitmen tersebut harus dilandasi dengan kesadaran diri dari berbagai pihak maupun perbaikan fasilitas yang kurang memadai ataupun adanya keterbatasan sarana dari fasilitas tersebut.

Pemerintah ataupun yang biasa disebut dengan birokrat ini, sebagai pemangku jabatan dan memiliki fungsi utama dalam menjalankan ataupun mengimplementasikan serta membuat berbagai terobosan peraturan ataupun hukum yang ada, selayaknya wajib mengevaluasi dari hasil implementasi program-program yang sudah dibuat sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan dan disepakati sejak awal. Hasil evaluasi tersebut bisa menjadi indikator dalam memperbaiki tatanan dari hasil kinerja yang telah dilaksanakan ataupun yang telah di implementasikan terhadap masyarakat sebagai adanya bentuk dari reformasi birokrasi, khususnya dalam masalah pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparat negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan diharapkan dari hari ke hari semakin berkualitas (Mulyadi, Gedeona, dan Afandi, 2018:43).

Ketika berbicara tentang pelayanan publik jelas bahwa hal yang perlu di siapkan oleh aparat pemerintah adalah bagaimana tercipta pelayanan yang prima. Dalam mengembangkan pelayanan prima, pemerintah harus mempunyai standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik sendiri merupakan suatu tolak ukur yang dapat digunakan sebagai rujukan mutu pelayanan yang akan diberikan atau dijanjikan kepada pelanggan atau orang lain atau masyarakat. Hal tersebut dapat menaruh perhatian tentang bagaimana mekanisme pelayanan yang baik harus dilakukan dan merupakan yang terbaik diberikan kepada pelanggan-pelanggan (Sellang, Jamaluddin, Mustanir: 2019: 42-43).

Salah satu tujuan implementasi E-Government adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi. Pemerintah kabupaten Sidoarjo berupaya meningkatkan mutu dan kualitas layanan dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan adanya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo, pada ketentuan ini pengembangan TIK bertujuan untuk menjamin terlaksananya mutu pelayanan publik. Atas dasar ini Kecamatan Sukodono mengembangkan inovasi layanan publik berbasis e-government dalam bidang pelayanan administrasi melalui implementasi program BMW sejak 2015. Dengan diprakarsainya BMW yang ada di Kecamatan Sukodono, menjadi awal mula adanya Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) yang ada di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ini menjadi awal sejarah berkembangnya layanan publik e-government yang di implementasikan pada layanan publik di seluruh instansi kecamatan kabupaten Sidoarjo saat ini.

Salah satu bentuk pelayanan publik berbasis e-government di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo adalah aplikasi Berkas Mlaku Dewe atau yang di singkat BMW. Merupakan suatu sistem aplikasi pelayanan masyarakat Kecamatan Sukodono berbasis web yang dapat diakses oleh semua masyarakat dan perangkat desa yang telah terintegrasi dengan Kecamatan melalui jaringan intranet dan internet. Pelayanan dengan aplikasi BMW dilakukan dengan metode pengiriman berkas pemohon ke Kecamatan menggunakan sistem elektronik melalui website yang memanfaatkan fasilitas alat peminda berkas (scanner) atau kamera (<http://sukodono.sidoarjo.go.id>, diakses tanggal 5 Oktober 2022). Aplikasi BMW awalnya dikembangkan di Kecamatan Sukodono Sidoarjo. Berdasarkan hasil dari data yang peneliti dapatkan aplikasi ini merupakan terapan dari Program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Sukodono) yang

memberikan prestasi bagi Kecamatan Sukodono sebagai Kecamatan Terbaik se-Jawa Timur tahun 2015 silam, menjadi peringkat kedua penyelenggara pelayanan publik di lingkungan kabupaten Sidoarjo tahun 2021, dan menjadi peringkat pertama penilaian mandiri pelaksanaan reformasi tahun 2021. Aplikasi BMW ini memanfaatkan jaringan internet untuk menyederhanakan dan memudahkan pelayanan yang terintegrasi dengan 19 desa di Kecamatan Sukodono. Desa tersebut diantaranya Wilayat, Kebonagung, Anggaswangi, Jumptrejo, Suruh, Pekarungan, Pademonegoro, Cangkringsari, Jogosatru, Ngaresrejo, Sambungrejo, Plumbungan, Sukodono, Kloposepuluh, Masangan Wetan, Suko, Masangan Kulon, Panjunan dan Bangsri.

Jenis layanan yang ada di Kantor Kecamatan Sukodono antara lain meliputi pembuatan e-KTP, layanan e-KTP hilang, penambahan dan perubahan KK, layanan pindah datang dan keluar, layanan kartu pencari kerja, pengurusan surat induk kesenian, permohonan legalisir, layanan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), layanan KIA (Kartu Identitas Anak), pengurusan surat keterangan ahli waris, layanan dispensasi nikah, layanan akta capil, layanan rekom akta kawin, serta pengaduan langsung dan pengaduan online (<http://sukodono.sidoarjokab.go.id>) diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

Adapun tata cara atau metode layanan BMW dari informasi yang peneliti dapatkan di Kecamatan Sukodono secara online yaitu:

1. Mengambil nomor antrian H-1 secara online melalui link <http://antriansukodono.sidoarjokab.go.id/pesannomor>
2. Mengisi biodata diri di website pengambilan nomor antrian.
3. Memilih instansi tujuan (Kecamatan Sukodono)
4. Datang ke MMPP Kecamatan Sukodono sesuai tanggal di nomor antrian
5. Menunjukkan Nomor antrian ke petugas. Petugas akan men scan barcode yang terdapat di nomor antrian
6. Pemohon menunggu dan nomor antrian akan dipanggil
7. Proses pengajuan berkas telah dilakukan
8. Mendapat tanda terima pengambilan

Sedangkan tata cara layanan BMW secara offline yaitu:

1. Langsung datang dan mengambil nomor antrian secara langsung yang akan dibantu oleh petugas
2. Menunggu nomor antrian dipanggil
3. Proses pengajuan berkas telah dilakukan
4. Mendapat tanda terima pengambilan

Berdasarkan keunggulan aplikasi layanan BMW dikatakan sangat efektif dan efisien dikarenakan pelayanannya yang cepat, mudah dan transparan terbukti dengan program BMW berhasil mendapatkan penghargaan saat pertama kali diterapkan. Pada kriteria kecukupan, aplikasi BMW terbukti telah memuaskan masyarakat serta mendapatkan respon yang baik dari masyarakat (Anggraeni, Rahaju, 2022:287). Keunggulan lain dari observasi yang peneliti dapatkan mengenai layanan BMW ini adalah layanan BMW ini ber slogan MANTAP (Mobile, Keamanan Data, Transparansi, Hemat, dan Kepastian). Mobile artinya bahwa pelayanan dapat dilakukan secara mobile, keamanan data yaitu pelayanan berbasis NIK serta tersimpan terpusat di server Kecamatan, transparansi yang bertujuan agar masyarakat dapat memonitor berkas secara real time, hemat yaitu dapat memangkas waktu, tenaga serta biaya, dan kepastian memiliki maksud pemberitahuan pengambilan hasil layanan dikirim langsung via SMS ke HP pemohon. Hal itulah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Kualitas Pelayanan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasi penelitian dengan teknik wawancara atau interview maupun secara observasi di tempat

atau lokus penelitian. Pelaksanaan pendekatan deskriptif tidak hanya sebatas pada pengumpulan data dan penyusunan data saja, melainkan juga pada proses analisa data serta interpretasi data tersebut.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti guna memperoleh data yang akurat. Agar memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian ini di Kecamatan Sukodono.

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, sehingga tidak akan terjadi bias terhadap data yang diambil, serta untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan dalam penelitian ini. Menurut Spradley sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2018:209) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, mengatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam fokus penelitian ini mengacu pada pembaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Adapun fokus penelitian ini mengacu pada lima dimensi kualitas elayanan. Lima dimensi kualitas pelayanan ini terdiri dari:

1. Tangibles (bukti fisik);
2. Reliability (kehandalan);
3. Responsiveness (ketanggapan);
4. Assurance (jaminan dan kepastian);
5. Empathy (empati);

Sumber data menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2017:157), bahwasanya penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakannya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Informan Kunci (Key Person)
2. Tempat dan Peristiwa
3. Dokumen

Jenis data dalam suatu penelitian sangat berguan dan penting untuk dilakukan dengan suatu pemilihan, sehingga nantinya dapat mengetahui langkah-langkah selanjutnya yang akan ditetapkan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Jenis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data primer
2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2018:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilihat dengan berbagai cara, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara atau interview
2. Pengamatan atau observasi
3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2019:330) dengan tahapan analisis data tersebut sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verifying*)

Dalam pengujian keabsahan data, diperlukan adanya teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan tersebut didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018:270), meliputi :

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)
2. *Transferability* (Keteralihan)
3. *Dependability* (Standar Ketergantungan)
4. *Confirmability* (Kepastian)

Hasil

a. *Tangibles* (bukti fisik seperti komputer, jaringan internet/wifi, ruang tunggu layanan)

Komputer menjadi salah satu item penting atau media alat dalam proses unggah berkas dokumen dalam layanan online (daring) berbasis aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil dari pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, melihat fasilitas komputer yang ada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam proses unggah dokumen layanan Berkas Mlaku Dewe (BMW) masih layak digunakan dan tidak ada kendala sama sekali.

Wifi atau jaringan internet menjadi salah satu akses jaringan dalam proses unggah dokumen dalam layanan online (daring) berbasis aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW). Kecepatan jaringan wifi atau internet berdasarkan pengamatan atau observasi peneliti melalui wawancara dengan pegawai atau petugas yang sama Ibu Zuel Fatun Nikmah, SE tidak ada masalah dan sejauh ini masih lancar. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil wawancara berikut:

“... Kita ada jaringan dari diskominfo, juga kita menggunakan indihome. Karena memang kita diwajibkan untuk diskominfo itu nge link sama pemda (tersambung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo). Kalau indihome untuk internet kita sendiri. Kalau seandainya ada trouble kan (jika seandainya terdapat masalah) mungkin bisa, hmm mungkin kalau yang trouble diskominfo (seandainya yang bermasalah diskominfo) dialihkan ke indihome begitupun sebaliknya. Jaringannya juga lancar dan besar. Karena kapasitasnya besar mbak. Karena dulu itu (karena sebelumnya pada saat itu) BMW itu nge link (terkoneksi/terhubung) dengan desa. Kalau ibarat hp itu menggunakan hotspot (area yang terjangkau wifi). Jadi dari sembilan belas desa menggunakan wifi yang tersambung ke kecamatan ... “ (hasil wawancara 20 Oktober 2022).

Bukti fisik lain yang menjadi indikator dalam kualitas pelayanan berbasis aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) adalah ruang tunggu pelayanannya untuk warga yang mengambil hasil pengurusan dokumen yang telah selesai dikerjakan oleh petugas atau pegawai di Kecamatan Sukodono. Peneliti juga mengamati dan memberikan kesimpulan bahwa ruang tunggu pelayanan di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ini sudah baik, dan dari segi fasilitasnya pun cukup nyaman serta tertib dalam melihat warga yang mengantri mengurus karena terdapat AC, beberapa kursi yang memadai dengan kapasitas cukup banyak, serta nomor antrian sesuai urutan panggilan.

b. *Reliability* (Kehandalan)

Reliability (kehandalan) merupakan kemampuan petugas atau pegawai instansi untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Berdasarkan sasaran fokus dari reliability (kehandalan) yang peneliti tulis di bab tiga, terdapat dua sasaran kehandalan yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan prosedur masing-masing pelayanan dengan berbasis aplikasi BMW (Berkas Mlaku Dewe).

Terdapat beberapa jenis layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe) diantaranya meliputi pembuatan e-KTP, layanan e-KTP hilang, penambahan dan perubahan KK, layanan pindah datang dan keluar, layanan kartu

pencari kerja, pengurusan surat induk kesenian, permohonan legalisir, layanan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), layanan KIA (Kartu Identitas Anak), pengurusan surat keterangan ahli waris, layanan dispensasi nikah, layanan akta capil, layanan rekom akta kawin, serta pengaduan langsung dan online. Peneliti melakukan observasi bahwa layanan tersebut sudah dilakukan oleh warga serta petugas sesuai dengan masing-masing syarat prosedur layanan yang ditampilkan di website Kecamatan Sukodono yaitu <http://sukodono.sidoarjo.go.id>. Bagi warga yang tidak mengerti persyaratannya, warga bisa melakukan pengurusan dengan datang langsung (secara offline) ke Kecamatan lalu bertanya dengan pegawai disana, pegawai akan memberikan penjelasan sampai warga atau pemohon paham dan terdapat pula brosur yang bisa dibaca oleh warga atau pemohon agar tidak lupa dengan penjelasan dari pegawai.

2. Bapak Camat dan para Kasi (Kepala Seksi) selalu memonitoring dan memberikan arahan untuk pelayanan administrasi kependudukan di MMPP (Mini Mall Pelayanan Publik) Kecamatan Sukodono agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) camat merupakan pemimpin di Kecamatan yang mempunyai tugas salah satunya memonitoring dan memberikan arahan serta di ikuti oleh para Kasi (Kepala Seksi) yang membantu untuk melaksanakan tugasnya. Seperti di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tugas camat dan para kasi selalu memonitoring dan memberikan arahan untuk pelayanan administrasi kependudukan di MMPP (Mini Mall Pelayanan Publik) agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya untuk layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe). Berikut hasil interview atau wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pegawai Kecamatan Sukodono, Ibu Zuel Fatun Nikmah SE sebagai berikut :

“...Sudah hampir setiap hari dilakukan mbak, ngga hanya di aplikasi tersebut. Pak camat pun juga melihat kondisi layanan disini, dan memang itu harus setiap hari dilakukan untuk mengevaluasi layanan, bukan hanya di aplikasinya aja. Kalau di aplikasinya mungkin kayak gimana ngga ada masalah? ngga ada masalah. Kalaupun ada masalah tentang jaringan dan sebagainya. Kita punya petugas IT yang ada disini, jadi ga perlu panggil orang luar. Dan kalau layanan BMW sendiri, sampai saat ini tidak ada masalah. Serta yang menjadi fokus dalam pantauan pak camat dalam layanan BMW sendiri adalah kecepatannya...” (hasil wawancara 20 Oktober 2022).

Hal tersebut juga didukung oleh salah satu pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang bernama Mas Wahyudi sebagai staff pelayanan di Kecamatan Sukodono. Berikut pernyataannya:

“...Camat pasti memonitoring mbak. Setiap hari itu dilakukan, cek operator BMW yang ada disini untuk memastikan ada kendala atau tidak. Itu kan juga bagian dari memonitoring...” (hasil wawancara, 16 Desember 2022).

c. Responsiveness (tanggapan)

Responsiveness (tanggapan) merupakan kemauan pegawai atau petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan dalam hal ini yang dimaksud adalah warga atau masyarakat yang mengurus layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan penyampaian informasi yang jelas dari petugas atau pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Dalam fokus atau sasaran penelitian ini terdapat beberapa elemen yang menjadi unsur fokus indikator responsiveness atau tanggapan dari kinerja pegawai atau petugas Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terhadap warga yang mengurus layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe). Peneliti juga melakukan observasi melalui interview atau wawancara dengan salah satu pegawai Kecamatan Sukodono dan warga yang mengurus layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe). Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Kecamatan Sukodono, Ibu Zuel Fatun Nikmah SE sebagai berikut:

“... Jika terjadi kendala dalam layanan BMW, semisal pemohon terkendala atau menunggu lama di desa (dalam arti kepengurusan di kantor desa), kita sarankan mengurus dengan manual (datang langsung ke Kecamatan). Jika terjadi kendala biasanya dari internetnya mbak, tetapi dalam sebulan ini alhamdulillah

tidak pernah, lancar-lancar saja. Untuk sosialisasinya sendiri, pada awal layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe) ini dibuat, sosialisasinya dilakukan hanya kepada perangkat desa di kantor desa mbak tidak langsung kepada masyarakat. Jadi tugas dari perangkat desa menyampaikan ini kepada warga atau masyarakat. Nah, tetapi jika ada warga yang masih belum mengerti, biasanya mereka datang langsung ke kecamatan. Kami juga menyediakan beberapa brosur yang sama seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada di website kecamatan Sukodono. Ya engga banyak sih mbak, atau biasanya kami arahkan melalui website saja agar lebih jelas...” (hasil wawancara 20 Oktober 2022).

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh salah satu warga desa Klopok Sepuluh, Ibu Sulis yaitu:
“... Selama saya mengurus layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe) disini tidak pernah ada masalah ya mbak. Kalau ada yang saya ngga mengerti, saya biasanya langsung tanya ke salah satu pegawainya dan langsung di tanggapin sih. Langsung fast respon (merespon cepat). Penjelasannya itu juga mudah dipahami sih, baik kok pelayanannya yang saya lihat sejauh ini...” (hasil wawancara 24 Oktober 2022).

Berdasarkan hasil interview atau wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu warga desa Klopok Sepuluh Kecamatan Sukodono menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan dari sisi responsiveness (tanggapan) yang telah dilakukan dari pegawai atau petugas Kecamatan Sukodono dapat dikatakan baik karena penilaian salah satu warga yang sudah merasakan layanan yang dibantu oleh pegawai atau petugas Kecamatan Sukodono dalam layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe). Begitupun berdasarkan pengamatan atau observasi peneliti yang mudah mendapatkan informasi dari penyampaian informasi oleh salah satu pegawai atau petugas Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

d. Assurance (jaminan)

Assurance (jaminan) merupakan bentuk untuk mengetahui adanya rasa aman serta kepercayaan maupun kepastian yang diharapkan dari masyarakat terhadap pegawai tersebut dalam melayani. Dalam fokus penelitian ini, terdapat beberapa elemen atau sasaran yang menjadi indikator assurance (jaminan). Yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan petugas untuk memberikan layanan terhadap warga dalam penggunaan BMW (Berkas Mlaku Dewe)

Kemampuan petugas atau pegawai Kecamatan diharapkan dapat memberikan layanan dengan kualitas pelayanan yang baik (good services) terhadap warga dengan jaminan serta rasa aman yang dapat dipercaya atau amanah. Hal ini disampaikan oleh salah satu petugas atau pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang bernama Ibu Zuel Fatun Nikmah SE, berikut hasil interview atau wawancaranya:

“... SDM (Sumber Daya Manusia) disini cukup memadai dengan kualitas SDM yang baik sih mbak. Makanya kita merekrut pegawai yang masih muda, karena tingkat kemampuan IT (Informasi dan Teknologi) nya sudah pintar. Otomatis ketika mengoperasikan aplikasi layanan tersebut, menjadi mudah dalam melayani warga atau masyarakat semisal ada warga atau masyarakat yang melakukan complain terhadap layanan aplikasi tersebut...” (hasil wawancara 20 Oktober 2022).

Peneliti juga melakukan interview atau wawancara dengan salah satu warga desa Klopok Sepuluh yaitu Ibu Cahya mengenai kemampuan petugas dalam memberikan layanan terhadap warga dalam penggunaan BMW (Berkas Mlaku Dewe). Berikut hasil wawancaranya:

“... Saya melihat kemampuan petugasnya menurut saya ya baik sih mbak sejauh ini, ya memang ada kelebihan dan kekurangannya. Ya cepat di tanggapi, mudah di mengerti penjelasannya. Kan saya disini mengurus surat pindah datang, ya sudah di layani sesuai prosedur gitu. Tapi saya ngurusnya langsung mbak, maksudnya menyerahkan berkas berkasnya yang dibutuhkan. Kalau secara online (daring) itu petugasnya yang nge upload (mengunggah) data datanya gitu..” (hasil wawancara 23 Oktober 2022).

2. Menjaga data warga dengan baik

Setiap instansi layanan publik, wajib untuk memberikan jaminan rasa aman pada setiap warga yang mengurus. Khususnya untuk data yang dijadikan syarat kepengurusan agar tidak terjadinya kebocoran data yang tidak di inginkan. Tidak hanya itu, petugas atau pegawai juga wajib memberikan rasa kepercayaan untuk warga agar kualitas pelayanan tersebut dapat terjaga dengan baik. Peneliti melakukan observasi melalui interview atau wawancara dengan salah satu warga desa Klopo Sepuluh, Ibu Sulis mengenai hal tersebut, sebagai berikut pernyataannya:

“... Untuk masalah keamanan datanya sendiri, saya ga tau ya mbak (kurang mengerti). Insya allah sih aman aman saja mbak. Soalnya (karena) ya kalau semisal terjadi hal yang tidak di inginkan, ya tinggal lapor aja ke Kecamatannya kok bisa gini gitu. Tapi, ya saya yakin sih mbak petugasnya tidak mungkin seperti itu. Pasti akan menjaga lah mbak, kalau engga bisa di laporkan itu mbak. Tapi, sejauh ini saya ga ada masalah tentang hal itu sih mbak...” (hasil wawancara 24 Oktober).

Peneliti juga mewawancarai salah satu pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang bernama Ibu Zuel Fatun Nikmah mengenai hal tersebut, berikut pernyataannya:

“... Data warga sudah tersimpan dengan baik, sudah terarsip juga. Sudah tersimpan di gudang arsip mbak. Kita cara menjaganya selalu kita arsipkan setiap hari. Setiap hari, kita handle (tangani) dalam satu bulan. Jadi kita tata gitu, agar mudah di cari. Semisal mungkin ada kendala seperti kebocoran data, itu tidak mungkin dari kita (pihak kecamatan), itu pasti oknum dari luar mbak. Tapi sejauh ini sih tidak ada masalah mbak ...” (hasil wawancara 20 Oktober).

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari tiga pegawai perangkat desa di masing-masing kantor desa Masangan Kulon, Klopo Sepuluh, dan Masangan Wetan. Berikut pernyataannya:

“... Untuk masalah keamanan data, ngga pernah ada kebocoran data sih mbak disini. Sudah terarsip aman disini mbak...” (hasil wawancara dengan Bapak Deddy Effendi, Kepala Seksi Desa Masangan Kulon, 15 Desember 2022).

“... Untuk masalah keamanan data layanan BMW ini aman mbak, sudah kita arsipkan, dan karena sudah tersambung dengan diskominfo Sidoarjo juga. Jadi yang jelas web nya sudah aman karena tersambung dengan diskominfo sidoarjo. Karena BMW ini kan sudah ada tampilan web nya yang operator bmw sidarjokab.go.id itu jadi agar lebih aman tidak sembarangan orang bisa mengakses kecuali yang ada keperluannya pakai layanan BMW itu saja...” (hasil wawancara dengan mas Ahmad Haris, Keuangan dan Staf Pelayanan Desa Klopo Sepuluh, 16 Desember 2022).

“... Untuk masalah keamanan data tidak ada masalah. Karena kita langsung arsip- kan di gudang arsip setelah kita link (sambungkan) ke Kecamatan. Jadi dalam mengurus BMW ini warga mempunyai pegangan asli dan arsip untuk di desa...” (hasil wawancara dengan pegawai Kepala Dusun sekaligus staf layanan yang ada di Desa Masangan Wetan, 19 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa untuk saat ini tidak pernah terjadi masalah kebocoran data untuk layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo baik itu dari pernyataan salah satu warga yang mengurus ataupun dari pernyataan salah satu pegawai di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

3. Memberikan solusi jika sewaktu waktu layanan aplikasi BMW terkendala

Terkadang, layanan secara online (daring) tidak selalu dapat berjalan dengan lancar. Faktornya bisa karena jaringan atau wifi, masalah teknis dan sebagainya. Dibutuhkan solusi yang dapat mencegah atau menyelesaikan hal tersebut. Peneliti juga melakukan interview atau wawancara dengan salah satu pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang bernama Ibu Zuel Fatun Nikmah, berikut pernyataannya:

“... Sejauh ini tidak pernah ada masalah sih mbak. Ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalaupun terjadi kendala pada aplikasi layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe) kita ada teknisi sendiri yang langsung menangani hal tersebut...” (hasil wawancara 20 Oktober).

Berdasarkan observasi peneliti melalui hasil wawancara tersebut, jika terjadi kendala atau masalah dengan layanan aplikasi BMW (Berkas Mlaku Dewe) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, petugas atau pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo langsung menanggapi dengan masalah yang terjadi.

e. Empathy (empati)

Empathy (empati) merupakan bentuk kepedulian serta kepuasan dalam melayani masyarakat atau warga yang mengurus. Berkaitan hal tersebut peneliti melakukan interview atau wawancara dengan salah satu warga desa Klopo Sepuluh, Ibu Sulis mengenai kepedulian petugas atau pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk empatinya melayani warga, berikut pernyataannya:

“... Pelayanan di Kecamatan Sukodono menurut saya sudah cukup baik sih mbak. Informasi yang disampaikan dari petugasnya juga sudah cukup jelas menurut saya. Tapi mungkin di setiap pelayanan pasti ada kekurangannya ya mbak. Ya tapi sejauh ini menurut saya sih baik aja pelayanannya, ga ada yang bermasalah. Selalu ada pemberitahuan dari pihak kecamatan kalau (jika) sudah jadi, misal mengurus kayak (seperti) surat pindah datang gitu...” (hasil wawancara 24 Oktober).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh salah satu warga desa Masangan Kulon, Bapak Tri, berikut pernyataannya :

“... Ya selama ini menurut saya tentang petugasnya atau pegawainya ngga ada masalah. Misal saya mau mengurus e-KTP disini ya saya datang langsung, saya bawa berkas persyaratan yang di minta dari surat pengantar RT, RW lalu di desa setelah itu ke Kecamatan. Ya tetap di layani dengan baik oleh petugasnya mbak...” (hasil wawancara 22 Oktober)

Peneliti juga melakukan interview atau wawancara dengan salah satu pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Ibu Zuel Fatun Nikmah mengenai hal tersebut. Berikut pernyataannya:

“... Dari sisi waktu, kita berusaha untuk memberikan layanan cepat dan tepat ya mbak. Masing-masing pemohon itu beda beda ya mbak. Jadi kita harus menjelaskan dengan detail kadang-kadang, karena ada yang sudah paham dan masih belum paham. Itu tahap dimana kita memberikan pemahaman dalam menyampaikan informasi sampai mereka benar benar mengerti mbak. Dari sisi waktu, kita juga berusaha melayani sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada di Kecamatan. Jadi, sejak ada layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe) ini mbak, semisal mau mengurus untuk bikin KK (Kartu Keluarga) sekarang bisa di cetak mandiri karena sudah bisa dikirim online (daring) kalau sudah jadi, tidak seperti dulu yang harus ambil dulu di Kecamatan sekarang engga kecuali kalau untuk e-KTP ya karena blanko kan, jadi harus diambil langsung di Kecamatan biasanya warga itu. Dan dari sisi ketertiban antrian disini, saya rasa sudah tertib sih karena mengambil nomor antrian dulu sesuai warga mau mengurus layanan BMW (Berkas Mlaku Dewe) apa gitu...” (hasil wawancara 20 Oktober).

Berdasarkan hasil wawancara diatas serta observasi peneliti bahwa dari sisi empati petugas atau pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terhadap warga sudah terlihat baik dan menjalankan sesuai prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan warga yang mengantri layanan pun juga tertib.

Diskusi

Dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah di paparkan sebelumnya yaitu untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo maka peneliti menggunakan teori dari lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dikutip oleh Hasnih, Gunawan, dan Hasmin (2016:432) yaitu antara lain sebagai berikut:

1. *Tangibles* (bukti fisik)

Menurut Parasuraman dikutip oleh Hasnih, Gunawan, dan Hasmin (2016:432) *tangibles* (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Suatu perusahaan yang dimaksud disini adalah instansi terkait, yaitu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Sarana dan prasarana bukti fisik menjadi faktor penting sebagai penunjang layanan *online* (daring) yang ada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo seperti komputer, *wifi*/jaringan internet serta ruang tunggu pelayanan. Aspek *tangibles* (bukti fisik) juga menjadi salah satu aspek utama untuk memadai adanya fasilitas layanan publik dan sebagai tolak ukur terhadap kualitas pelayanan. Masyarakat akan menggunakan indera penglihatannya dalam menilai bagaimana kualitas layanan publik di suatu instansi apakah baik atau buruk. Oleh karenanya, penting bagi suatu perusahaan atau instansi mengetahui seberapa besar pengaruh dari aspek *tangibles* (bukti fisik) yang ada pada indikator kualitas layanan publik.

Salah satu dimensi ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada layanan aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sebagai bukti nyata fisik atau penunjang dari fasilitas layanan *online* yang dikerjakan oleh petugas atau pegawai di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Bukti fisik dalam kualitas layanan yang digunakan dalam layanan berbasis aplikasi BMW (Berkas Mlaku Dewe) berdasarkan data dari aspek-aspek kajian yang digunakan serta di uraikan dari hasil observasi atau pengamatan peneliti pada fokus sasaran penelitian ini dapat dinyatakan sudah cukup berkualitas dan memenuhi aspek-aspek dari dimensi teori *tangibles*. Karena dibuktikan dengan adanya pelayanan publik terhadap masyarakat yaitu kondisi komputer, jaringan *wifi* serta ruang tunggu yang memadai.

2. *Reliability* (kehandalan)

Menurut Parasuraman dikutip oleh Hasnih, Gunawan, dan Hasmin (2016:432) *reliability* (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

Dalam dimensi *reliability* (kehandalan) kemampuan petugas atau pegawai sebagai salah satu SDM (Sumber Daya Manusia) sudah cukup berkualitas karena berdasarkan pengamatan peneliti, pelayanan dari staf pegawai sudah mengarahkan masyarakat atau warga ke bagian yang di tuju lalu pembuktian lainnya bisa dibuktikan dengan adanya pelayanan yang tanggap dan aktif saat situasi sedang ramai atau penuh antrian. Staf dan pegawai yang bekerja di Kecamatan Sukodono ini mampu mengatasi lonjakan dari antrian tersebut. Dari SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Sukodono sudah berperan sesuai dengan peran masing-masing. Pelayanan di loket tergolong bekerja cepat namun tetap ketentuan yang berlaku.

3. *Responsiveness* (tanggapan)

Menurut Parasuraman dikutip oleh Hasnih, Gunawan, dan Hasmin (2016:432) *responsiveness* (tanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Dilihat dari beberapa aspek yang ada di dalam dimensi *responsiveness* (tanggapan) yaitu kemampuan petugas atau pegawai di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo memberikan respon pelayanan yang dapat memuaskan keinginan warga yang mengurus dengan layanan *online* (daring) BMW (Berkas Mlaku Dewe).

Berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi peneliti bahwa aspek *responsiveness* (tanggapan) sudah dinyatakan berkualitas dan mendapatkan tanggapan yang positif oleh warga yang mengurus. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti.

4. Assurance (jaminan)

Menurut Parasuraman dikutip oleh Hasnih, Gunawan, dan Hasmin (2016:432) *assurance* (jaminan) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya dan pelanggan kepada perusahaan. Dilihat aspek dari *assurance* (jaminan) dalam layanan online BMW (Berkas Mlaku Dewe) ini adalah kemampuan petugas untuk memberikan layanan terhadap warga dalam penggunaan BMW (Berkas Mlaku Dewe), keamanan data warga serta solusi yang diberikan dari pihak instansi jika sewaktu waktu layanan aplikasi BMW (Berkas Mlaku Dewe) terjadi kendala.

Berdasarkan dimensi *assurance* (jaminan) pelayanan berbasis aplikasi BMW (Berkas Mlaku Dewe) yang ada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, keamanan data warga sudah terjamin dan terjaga dengan baik karena sudah terarsip dengan baik oleh pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo di gudang arsip.

5. Empathy (empati)

Menurut Parasuraman dikutip oleh Hasnih, Gunawan, dan Hasmin (2016:432) *empathy* (empati) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Merupakan bentuk kepedulian terhadap keinginan serta kepuasan dalam melayani masyarakat yang mengurus. Dimensi empati adalah salah satu bentuk dimensi kepekaan petugas atau pegawai dalam memahami keinginan masyarakat atau warga. Dimensi yang memberikan peluang besar untuk memberikan pelayanan yang bersifat “*surprise*” sesuatu yang tidak diharapkan masyarakat ternyata diberikan oleh penyedia layanan. Pelayanan yang berempati akan mudah diciptakan jikalau setiap pegawai mengerti kebutuhan spesifik penerima layanannya.

Dari segi empati, para pegawai di Kecamatan Sukodono memiliki tingkat kepedulian yang luar biasa. Hal tersebut dapat ditinjau dari perlakuan pegawai terhadap masyarakat yang tidak memahami informasi dan dapat mengarahkan, menjelaskan dengan pemahaman yang mudah di mengerti oleh masyarakat umum.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan temuan data di lapangan yang telah di jelaskan atau di paparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat diuraikan serta disimpulkan mengenai kualitas pelayanan berbasis aplikasi BMW (Berkas Mlaku Dewe) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo melalui teori lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman yaitu *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (tanggapan), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati) bahwa :

1) Dari sisi *tangibles* (bukti fisik), dalam kualitas layanan yang digunakan dalam layanan berbasis aplikasi BMW (Berkas Mlaku Dewe) berdasarkan data dari aspek-aspek kajian yang digunakan serta di uraikan dari hasil observasi atau pengamatan peneliti pada fokus sasaran penelitian ini dapat dinyatakan sudah cukup berkualitas dan memenuhi aspek-aspek dari dimensi teori *tangibles*. Karena dibuktikan dengan adanya pelayanan publik terhadap masyarakat yaitu kondisi komputer, jaringan wifi serta ruang tunggu yang memadai.

2) Dari sisi *reliability* (kehandalan), kemampuan petugas atau pegawai sebagai salah satu SDM (Sumber Daya Manusia) sudah cukup berkualitas karena berdasarkan pengamatan peneliti, pelayanan dari staf pegawai sudah mengarahkan masyarakat atau warga ke bagian yang di tuju lalu pembuktian lainnya bisa dibuktikan dengan adanya pelayanan yang tanggap dan aktif saat situasi sedang ramai atau penuh antrian. Staf dan pegawai yang bekerja di Kecamatan Sukodono ini mampu mengatasi lonjakan dari antrian tersebut. Dari SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Sukodono sudah berperan sesuai dengan peran masing-masing. Pelayanan di loket tergolong bekerja cepat namun tetap ketentuan yang berlaku.

3) Dari sisi *responsiveness* (tanggapan), berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi peneliti bahwa aspek *responsiveness* (tanggapan) sudah dinyatakan berkualitas dan mendapatkan tanggapan yang positif oleh warga yang mengurus. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti.

4) Dari sisi *assurance* (jaminan), pelayanan berbasis aplikasi BMW (Berkas Mlaku Dewe) yang ada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, keamanan data warga sudah terjamin dan terjaga dengan baik karena sudah tersip dengan baik oleh pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo di gudang arsip.

5) Dari sisi *emphaty* (empati), para pegawai di Kecamatan Sukodono memiliki tingkat kepedulian yang luar biasa. Hal tersebut dapat ditinjau dari perlakuan pegawai terhadap masyarakat yang tidak memahami informasi dan dapat mengarahkan, menjelaskan dengan pemahaman yang mudah di mengerti oleh masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Anggara, S. 2012. *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. CV Pustaka Setia.
- Aspiani. 2018. "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Pengguna Jasa Transportasi Grab Online di Kota Makassar." *Kualitas Pelayanan* (Kualitas Pelayanan) 399–404.
- Conny, S. R. t.thn. "Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya." <https://books.google.co.id/books?id=dSpAIXuGUCUC&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.
- Deddy, Mulyadi, Gedeona Hendrikus T., dan Afandi Muhammad Nur. t.thn. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik* (J. Edah & Y. Eris (eds.)). ALFABETA.
- Erik, L. J. 2002. *NPM-New Public Management- CRITICAL REVIEW*.
- Gambaran Umum Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. 2015. *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu (Issue March).
- Hasanah, D. I. 2019. "Moral dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik." *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 48–58.
- <http://simpeg.bkd.sidoarjokab.go.id/simpeg/cari?q=satker%3A5L01>
- <https://operatorbmw.sukodono.sidoarjokab.go.id/>
- Khulasotul, Wafiyah. 2018. "Kualitas Pelayanan Satu Pintu Di Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Vol. 10, Issue 2)."
- Lati Praja, Delmana. 2019. "PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM E-PURCHASING UNTUK MENCEGAH KORUPSI." *Ilmu Pemerintahan* 45, 48.
- M. Darwin. 2021. Kecamatan Sukodono Dalam Angka 2021
- Moleong, L. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Murtini, S. t.thn. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal Di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya." *Jurnal Geografi* 31-37.
- Nugraha. 2018. "E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN)." Paparan ZI Perjalanan WBK Menuju WBBM Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
- Prabandari, A. 2018. "KUALITAS PELAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman)." *In Ekp* (Vol. 13, Issue 3).
- Prasanti, D. 2018. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6(1), 13–21.

- Pribadi, Frita Ayu, dan F Niswah. 2019. "Kualitas pelayanan elektronik cepet mule (cepat, tepat, mudah dan tidak bertele-tele) di kantor kecamatan tulangan kabupaten sidoarjo." *Jurnal Publika* 7(8).
- PT, M. A. D. P. (MADEP), & Manaf Abdul. t.thn. *Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik*.
- Putra, Purboyo Darma, dan Fanida Hany Eva. 2018. "Implementasi Pelayanan Publik Berkas Mlaku Dewe (BMW) Di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo."
- Rangan, G. A. 2020. "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kecamatan Bontang Barat." *Ilmu Pemerintahan* 507–520.
- RI, K. 2013. "Pelayanan Publik." *In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9)*.
- Ria, Enitasari, dan Hertati Diana. 2019. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Si-doarjo." *Administrasi Publik* 4.
- Sellang, K., Jamaluddin, & Mustanir, A. 2018. "Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Dimensi, Konsep, Indikator, dan Implementasinya (Issue June)*. Qi-ara Media.
- Struktur Organisasi Kecamatan Sukodono
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. "Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan."
- t.thn. *PERATURAN BUPATI NO. 46 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENUJU SMART CITY DI KABUPATEN SIDOARJO*.
<http://sukodono.sidoarjokab.go.id/>.
- Usanto, J., dan Z Anggraini. 2019. "KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT TABIR ULU KABUPATEN MERANGIN." 25.
- Widya, Mohi Kurniati, dan Mahmud Irmanovika. 2018. "Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Buliyohuto Kabupaten." *Ilmu Administrasi Publik* 104.

**Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita Di
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat**
*Effort To Manage Stunting In Children In Solok Regency, West Sumatera
Province*

Rizqa Inatsaa Septivani, Ditha Arsyia Arshita, Alvien Adiwidya Permana
Universitas Hang Tuah

Email: Rizqainatsaa2004@gmail.com; Ditha.arsya@gmail.com; Permanaalvien554@gmail.com

ABSTRACT

The problem of stunting is still a serious concern in Indonesia, including in West Sumatra Province. Data from Riskesdas 2018 revealed that the prevalence for short and very short children under five in West Sumatra is 30%, and was close to the national prevalence (30.8%). This study aims to describe the sociocultural problems, local potential, and formulate alternative policies in effort to prevent and control stunting in children under five in Solok Regency. The research design used qualitative methods. Primary data collection was carried out by in-depth interviews and observations. The technique of selecting informants was done purposively. The results of the study revealed that the socio-cultural problems in efforts to prevent and control stunting in toddlers are still limited public knowledge about the causes and efforts to prevent stunting, inadequate understanding of the importance of balanced nutritional needs, and the behavior, parenting patterns, and feeding habits of toddlers who does not support the prevention and control of stunting in children under five. It is recommended that there should be alternative policies and action plans for stunting prevention, among others, by increasing knowledge through socialization about the risk of stunting on children's intelligence, increase participation and community empowerment for stunting prevention by utilizing the local potential such as curd and bilih fish in Solok Regency, West Sumatra Province.

Keywords: Socio-culture, stunting, toddlers, policies, local potentia

ABSTRAK

Permasalahan stunting masih menjadi perhatian yang serius di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil data Riskesdas tahun 2018 mengungkapkan bahwa data prevalensi pendek dan sangat pendek pada balita di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 30%, dan mendekati prevalensi nasional (30,8%). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang permasalahan sosial budaya, potensi lokal, dan merumuskan alternatif kebijakan dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi stunting pada balita di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi. Teknik pemilihan informan ini dilakukan secara purposive. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa permasalahan sosial budaya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting pada balita adalah masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang penyebab dan upaya pencegahan stunting, belum memadainya pemahaman tentang pentingnya kebutuhan gizi yang seimbang, dan adanya perilaku, pola asuh serta kebiasaan pemberian makanan pada balita yang kurang mendukung upaya pencegahan serta penanggulangan stunting pada balita. Disarankan perlu adanya alternatif kebijakan dan rencana aksi penanggulangan stunting yaitu antara lain dengan peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi tentang risiko stunting terhadap kecerdasan anak balita, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan stunting dengan memanfaatkan potensi lokal seperti dadih dan ikan bilih di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Kata kunci: Sosial budaya, stunting, balita, kebijakan, potensi lokal

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data prevalensi balita *stunting* yang dihimpun *World Health Organization* (WHO) terungkap bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita *stunting* di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4 persen (Saputri & Tumangger, 2019). Selanjutnya berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 bahwa prevalensi anak balita *stunting* di Indonesia sebesar 37,2 persen (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013), dan data prevalensi anak balita *stunting* di Indonesia dari hasil Riskesdas tahun 2018 adalah sebesar 30,8 persen (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019).

Permasalahan *stunting* pada balita juga masih menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera. Data prevalensi balita pendek dan sangat pendek pada balita di Sumatera Barat berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 adalah sebesar 39,24 persen, yang melebihi prevalensi nasional (37,21%) (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Selanjutnya dari data hasil Riskesdas tahun 2018 diketahui bahwa data prevalensi balita pendek dan sangat pendek di Sumatera Barat sebesar 30 persen dan mendekati prevalensi nasional yang sebesar 30,8 persen (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019). Kriteria prevalensi yang dianggap berat menurut WHO adalah bila prevalensi pendek sebesar 30-39 persen dan serius bila prevalensi pendek ≥ 40 persen. Kemudian berdasarkan data gambaran status Gizi Balita di Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari pemantauan status gizi tahun 2015-2017 diketahui bahwa persentase balita yang masuk kategori pendek dan sangat pendek berdasarkan TB/U mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 30,6 persen, sedangkan sebelumnya sebesar 29,0 persen (2015), dan 27,5 persen (2016) (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2018).

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang persentase balita kategori pendek dan sangat pendek berdasarkan TB/U termasuk tinggi yaitu sebesar 39,9 persen pada tahun 2017 (peringkat kedua tertinggi), dan di atas rata-rata Sumatera Barat (30,9%) serta di atas rata-rata Nasional (29,6%) (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2018). Selanjutnya berdasarkan data hasil pemantauan Status Gizi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok diketahui bahwa persentase balita sangat pendek dan pendek (*stunting*) di Kabupaten Solok tahun 2018 adalah sebesar 30,5 persen (Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, 2018).

Permasalahan *stunting* pada anak balita merupakan konsekuensi dari beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan kemiskinan termasuk gizi, kesehatan, sanitasi dan lingkungan. Ada lima faktor utama penyebab *stunting* yaitu kemiskinan, sosial dan budaya, peningkatan paparan terhadap penyakit infeksi, kerawanan pangan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Aridiyah et al., 2015). Faktor sosial dan budaya antara lain meliputi pengetahuan masyarakat tentang *stunting*, pola asuh, perilaku/praktek dan kebiasaan pemberian makanan pada balita. Ada beberapa faktor penyebab masih tingginya kejadian *stunting* diantaranya adalah penyebab langsung karena kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Di samping itu, faktor lainnya adalah kurangnya pengetahuan ibu, adanya kesalahan dalam pola asuh, sanitasi yang kurang memadai dan belum memadainya pelayanan kesehatan serta masyarakat belum menyadari jika anak pendek merupakan masalah (Mitra, 2015). Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian *stunting* diantaranya terkait dengan tingkat pendidikan ibu, pengetahuan ibu tentang gizi, pemberian ASI Eksklusif dan umur pemberian makanan pendamping ASI (Aridiyah et al., 2015).

Permasalahan atau hambatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* tidak terlepas dari faktor-faktor sosial budaya dan lingkungan dalam masyarakat mereka berada, yang antara lain meliputi pengetahuan budaya dari masyarakat tertentu, adanya kebiasaan dan ketidaktahuan masyarakat yang bisa berdampak terhadap status gizi anak balita. Sehubungan dengan hal ini tujuan penulisan adalah untuk mendeskripsikan permasalahan sosial budaya, potensi lokal dan merumuskan alternatif kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada balita di Kabupaten Solok. Artikel ini didasarkan

pada hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Permasalahan Sosial Budaya Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita”.

Stunting merupakan permasalahan kekurangan gizi kronis yang di sebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam kurun waktu yang cukup lama yang diakibatkan oleh pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kejadian stunting bisa terjadi dimulai dari saat janin masih dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun (Kementrian Kesehatan, 2016). Beragam permasalahan seperti masalah kemiskinan, tingkat pengetahuan, pola asuh anak, kejadian bencana alam, ketersediaan pangan rendah, dan keberadaan pelayanan kesehatan bersumber pada permasalahan kebijakan ekonomi dan politik suatu negara merupakan masalah utama. permasalahan tersebut kemudian akan berdampak pada kurangnya asupan zat gizi balita dan penyakit infeksi (Kementrian Kesehatan, 2020).

Stunting merupakan menjadi salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data prevelensi balita stunting yang dihimpun WHO (World Health Organization) terungkap bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevelensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Indonesia sendiri pada tahun 2-19 mencatat terdapat 29,5% bayi lahir dengan kondisi prematur, dan 6,2% bayi lahir dengan kondisi berat endah. Golongan tersebut cenderung bisa masuk kedalam kategori anak yang akan mendapatkan gangguan pertumbuhan terutama stunting dan gangguan intelektual bahkan resiko kematian (Gunardi, 2021). Indonesia sedang mengalami bonus demografi dimana akan mencapai puncak keberhasilan pada tahun 2045, untuk itu pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten/Kota.

Provinsi Sumatra Barat berada pada urutan ke-17 dari 34 provinsi stunting di Indonesia dengan prevalensi balita (usia 24-59 bulan) stunting sebesar 36,2% lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu 35,3%. Prevalensi stunting ini bisa saka meningkat jika faktor-faktor dari penyebab stunting tidak diperhatikan. Peranan dari keluarga atau pola asuh dari ibu tentang bagaimana pola gizi yang baik untuk pertumbuhan anaknya. Sanitasi lingkungan juga berpengaruh terhadap permasalahan stunting ini. Sanitasi lingkungan yang kurang baik memiliki resiko yang tinggi terhadap penyebab terjadinya stunting (Anggraini & Rusdy, 2019)

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2019, ditetapkan bahwa Kabupaten Solok menjadi lokus stunting di Sumatra Barat. Kabupaten Solok menempati urutan ketiga jumlah penderita stunting terbanyak di Sumatra Barat, setelah Pasanam dan Pasanam Barat. Tentunya hal ini menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Solok untuk menurunkan jumlah penderita stunting. Pemerintah juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi jumlah penderita stunting. Disebabkan karena tingginya angka stunting di Kabupaten Solok, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, kemudian menetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. Kurangnya konsisten pemerintah sehingga pelaksanaan pencegahan masih belum maksimal, program yang dilakukan masih baru dan belum sepenuhnya terlaksana, pelaksanaan yang belum optimal karena adanya kasus baru yang masuk ke Indonesia yaitu Covid-19 menjadikan keterbatasan kinerja lembaga daerah. Permasalahn di atas menyebabkan sulitnya mencapai keberhasilan dalam mewujudkan tujuan kebijakan penurunan atunting di Kabupaten Solok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur melalui dari beberapa sumber. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Solok Sumatera Barat. Alasannya karena daerah ini tergolong kedalam wilayah dengan jumlah penderita *stunting* terbanyak di Kabupaten Solok bagia barat. Untuk memperoleh hasil temuan penelitian ini mengandalkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan informasi data terkait kebijakan dalam upaya penanggulangan stunting pada balita di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang di ambil dari jurnal jurnal terdahulu yang kemudian di ringkas menjadi satu sehingga menjadi sebuah artikel

Teori Sosial Makro

Defenisi dari teori sosial makro adalah teori yang memperlakukan kajian – kajiannya pada struktur sosial dan pranata sosial. Konsep teoritis yang melakukan kajian mengenai karakteristik umum masyarakat (Trisni Andayani, 2020). Asumsi dasar teori ini yaitu beranggapan bahwa masyarakat merupakan entitas keseluruhan (makro), dan bukan sebagai individu maupun komunitas sosial (kumpulan individu). Teori sosial makro memiliki corak analisis yang sangat terlihat secara gamblang, yakni melakukan proses analisis berskala besar dan jangka panjang. Di lain sisi teori ini diasosiasikan dengan metodologi penelitian kuantitatif dengan logika deduktif yang sangat menekankan pada objektivitas.

Makro adalah bagian paling besar dan berada secara global atau umum. Cakupannya tidak hanya pada masyarakat di satu tempat saja, melainkan bisa menjangkau secara lebih luas misalnya suatu negara atau komunitas dunia. Hal inilah yang menjadikan efek yang berpengaruh sangat besar terhadap perubahan-perubahan individu dan masyarakat.

Teori sosial makro menurut para ahli:

1. Aristoteles

Aristoteles dalam Teori KOINONIA dan PIOLIS (Campbell, 1981)

Menurut Aristoteles, kemampuan manusia meliputi keinginan untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Sedangkan manusia atau masyarakat tidak dapat di pisahkan dengan keberadaan negara. Oleh karena itu, Aristoteles mengistilahkan masyarakat dengan Piolis dengan mengartikan komunitas sipil sebagai sosial kodrati dari individu. Selanjutnya kelompok sebagai Kiononia yang meliputi dimensi komunitas atau kelompok. Kelompok terkecil yaitu keluarga, kumpulan keluarga yang didasarkan kebutuhan kemudian menjadi desa. Selanjutnya, Aristoteles menyebut Piolis sebagai kumpulan desa (yang di dalamnya terdiri dari komunitas) yang tidak hanya menjamin keamanan, melainkan juga mempermudah perdagangan.

2. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes dalam teori NATURALIS (Campbell, 1981)

Thomas Hobbes mengungkapkan, dalam teori Naturalis bahwa “baik” adalah objek keinginan dan “buruk” adalah objek penolakan. Setiap individu adalah makhluk rasional yang akan menggunakan segala usaha untuk memperoleh keinginannya dalam mempertahankan hidupnya. Tindakan manusia adalah gabungan rasio dan keinginan dalam bentuk nafsu dan pergelakan untuk mencapai tujuan melalui kekuasaan. Kekuasaan diperoleh melalui konflik manusia membutuhkan masyarakat (Organisasi) sepanjang hidup, manusia membantu orang lain untuk bertahan hidup dan saling melengkapi, namun alasan lainnya untuk kepentingan egoistisnya. Hobbes menjelaskan bahwa “Perjanjian tanpa pedang akan sia-sia saja”. Semua hubungan sosial antar manusia bersifat buatan, yang berarti bahwa hubungan mereka adalah hasil dari perhitungan dan persetujuan. Dalam arti hubungan sosial hanya bersifat “eksternal” bagi individu dan bukan bagian dari kesepahaman moral bersama.

3. Adam Smith

Adam Smith dalam Teori EGOIS dan STRUKTUR SOSIAL (Campbell, 1981)

Adam Smith mengikuti Hobbes, bahwa setiap manusia lebih mementingkan dirinya sendiri (egois) dari pada kepentingan orang lain. Menurutnya, sentimen menimbulkan aturan sosial yang mengarahkan kepentingan diri, mengendalikan keegoisan dan mendorong kemurahan hati yang alamiah dan oleh karena itu, maka kehidupan sosial (interaksi dalam organisasi) di dasarkan pada konsensus. Hidup di dalam masyarakat (organisasi) berarti hidup bersama dalam kedamaian agar terhindar dari kematian serta melakukan kegiatan ekonomi untuk mempertahankan hidupnya. Dengan adanya keadilan agar tidak terjadinya konflik atau melukai dalam masyarakat. Dalam hal ini Smith lebih mengedepankan hubungan ekonomi, sebab dari hubungan ekonomi tersebut maka timbul organisasi masyarakat. Yaitu dari keinginan manusia untuk mencapai kesejahteraan material yang diawali dari mempertahankan hidupnya dan selanjutnya ingin di hormati oleh sesamanya, merupakan penyebab munculnya struktur sosial dan perubahan sosial.

4. Karl Marx

Karl Marx dalam Teori HUBUNGAN, PERUBAHAN SOSIAL, dan KELAS (Campbell, 1981) Pendekatan holistik Marx (1818- 1883) mengungkapkan bahwa manusia tidak memiliki kodrat yang sama dan tetap, melainkan hanya bersifat sosial. Hubungan sosial terjadi sebab usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengubah lingkungan material melalui kegiatan produksinya. Pada awalnya hubungan sosial dipengaruhi oleh perbedaan- perbedaan alamiah antar manusia berdasarkan kekuatan, ukuran, tenaga, dan kemampuan. Namun, diawali dengan struktur ekonomi masyarakat, pembagian kerja yang mengharuskan adanya suatu sistem pertukaran. Proses sosial ini menimbulkan perbedaan dalam pemilikan atau kontrol terhadap sumber- sumber alam dan alat-alat produksi. Penyebaran alat produksi melalui perkembangan teknologi merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Kelas majikan kapitalis (borjuis) dan kelas buruh proletariat. Perjuangan antar kelas akan terjadi yang mana kelas borjuis mewakili kepentingan sendiri, sedangkan kelas proletar, dalam pandangan utopis Marx, berjuang atas nama umat manusia (Lawang, 1986).

5. Emile Durkheim

Emile Durkheim dalam Teori INDIVIDUALISME dan KOLEKTIVISME (Campbell, 1981). Polaritas individualisme dan kolektivisme adalah pandangan yang selalu hadir dalam karya Durkheim (1858-1917). Polaritas di hadapan oleh karena keprihatinannya terhadap tatanan sosial dan pemenuhan diri manusia. Individualisme dan perbedaan individu dan otonomi pribadi dapat ditemui dalam versi sindikalisme dari sosialisme dan non-revolusioner, di mana individu dilindungi negara dalam posisinya sebagai anggota kelompok jabatan. Ia memandang bahwa kodrat manusia sebagai abstraksi total tingkah laku manusia yang realistis. Masyarakat adalah sebuah tatanan moral yaitu tuntunan normatif (kenyataan ideal) dan bukan kenyataan material. Masyarakat terbagi menjadi 2 pertama masyarakat sederhana dan kompleks, dan yang kedua masyarakat solidaritas sosial (mekanis dan organis).

6. Max Weber

Salah satu pemikiran yang muncul dari Max Weber ialah tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan suatu perilaku, perbuatan seorang individu atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan dirinya. Tindakan tersebut juga bisa dilakukan secara berkelompok, sehingga memberikan pengaruh bagi lingkungannya. Max Weber mengatakan bahwa tindakan sosial adalah sebuah tindakan manusia yang dapat memengaruhi individu- individu lain yang ada dalam masyarakat. Dalam karyanya mengatakan bahwa kenyataan sosial lahir tidak terlepas dari pemahamannya tentang motivasi seseorang dan tindakan sosial. Tindakan sosial yang dimaksud oleh Max Weber ialah tindakan yang dilakukan seorang individu memiliki sebuah makna dan tujuan bagi dirinya.

7. Alfred Schutz

Cara memaknai realitas sosial menurut Alfred Schutz adalah dengan tipifikasi. Tipifikasi adalah mencari klasifikasi berdasarkan kategori tertentu yang berelasi dengan kemungkinan orang memaknai suatu realitas simbolik. Dalam konteks ini, tipifikasi tersebut adalah membagi informan ke dalam 2 buah posisi yang saling diametral. Kumpulan pengetahuan yang sifatnya praktis yang hadir dalam masyarakat (tertentu), tidak dengan sendirinya diserap.

HASIL

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan **Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat** merupakan penelitian yang cukup banyak diambil oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka peneliti menyertakan beberapa penelitian sebelumnya untuk perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Jessyca Azzahra (2021). penelitian ini berjudul **Implementasi Kebijakan 5 Pilar Penurunan Stunting Dan Faktor Yang Mempengaruhi Di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok**. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori Aristoteles. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting secara

signifikan belum mampu menurunkan jumlah penderita stunting. Hasil ini, relevan dengan penelitian yang mengungkap belum optimalnya capaian kebijakan penurunan stunting. Misalnya, disebabkan karena masih rendahnya koordinasi dan kerjasama antar OPD (Febrian & Yusran, 2021) Belum optimalnya pelaksanaan konvergensi kebijakan (Iqbal dan Yusran, 2021) dan terjadinya perubahan orientasi fungsional antara kebijakan pangan, ekosistem lingkungan yang berpengaruh pada kejadian stunting (Yusran, 2021)

Penelitian kedua, dilakukan oleh Khairah Annisa (2021). penelitian ini berjudul **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori Aristoteles. berdasarkan temuan lapangan, tidak hanya karena pandemi covid-19, terdapat beberapa faktor penghambat lain nya dalam upaya pemerintah menurunkan angka stunting di Kabupaten Solok. Pertama, rendahnya komitmen dan kerjasama OPD yang ada di Kabupaten Solok. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, yang bergerak dalam pemenuhan gizi spesifik. Dalam proses pengambilan data atau yang menentukan anak stunting adalah dari Dinas Kesehatan. Pengambilan data melalui bidan nagari yang bertanggung jawab di puskesmas setempat. Pengambilan data mulai dari menimbang berat badan, mengukur tinggi, mengukur lingkaran kepala, dan mengukur lengan badan yang dilakukan oleh tenaga profesional dan paham indikator anak kategori stunting. tanggung jawab yang seharusnya di emban oleh tenaga lapangan yang profesional, malah di ambil alih oleh beberapa kader posyandu. Kader yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai indikator penetapan anak stunting mengakibatkan data menjadi tidak valid dilapangan. Kesalahan dalam pengukuran dan menginput data yang salah menyebabkan anak yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus menjadi tidak tepat sasaran. Belum lagi alat ukur yang tingkat keakuratannya masih sangat rendah.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Rahmadani Yusran (2022). penelitian ini berjudul **Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Kota Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori Aristoteles. Implementasi pencegahan yang diinginkan. Adapun dampak kegiatan dapat dilihat dari dampak stunting di Nagari Pulakek Koto Baru yang ditimbulkan atas pelaksanaan Solok Selatan belum terlaksana sesuai kebijakan tergambar dan terlihat PerMenKes RI No 14 Tahun 2019 apa perubahannya. Kemudian, mengenai Penyelenggaraan Teknis evaluasi dapat memberikan penilaian Surveilans Gizi. Hal ini dikarenakan mengenai sejauh mana kebijakan implementasinya belum sesuai tersebut telah terlaksana dan dinilai dengan tujuan kebijakan. Hal ini berdasarkan kriteria yang telah dilihat dari belum optimal ditentukan (Winarno (2014). pelaksanaan pencegahan stunting. Dengan demikian, evaluasi melalui program surveilans Gizi adalah suatu tahapan kebijakan yang dilihat dari masih kurangnya tingkat menggambarkan keberhasilan kerja partisipasi masyarakat untuk datang dan penelitian atas suatu kebijakan ke posyandu dan masih rendahnya yang telah dilaksanakan. Dimana tingkat pengetahuan ibu balita tujuan awal evaluasi tersebut adalah tentang pola asuh yang baik dan agar masalah dalam pelaksanaan benar. Kemudian, kurangnya implementasi bisa segera ditemukan konsistensi pemerintah daerah dalam dan diselesaikan dengan solusi yang pencegahan peningkatan kejadian tepat guna perbaikan bagi kebijakan stunting.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Yulfira Media dan Nilda ELfemi (2021). penelitian ini berjudul **Permasalahan Sosial Budaya Dan Alternatif Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat**. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori Aristoteles. Dalam artikel ini menunjukkan beberapa alternatif arah kebijakan dan rencana aksi dalam upaya pencegahan stunting pada balita adalah: 1. Optimalisasi peningkatan pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan stunting. Beberapa alternatif kegiatan yang diusulkan, yaitu peningkatan sosialisasi dengan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat melalui pelaksanaan kegiatan posyandu, opyimalisasi penyuluhan tentang stunting secara langsung kepada masyarakat, peningkatan sosialisasi tentang resiko anak stunting terhadap kecerdasan kepada masyarakat; 2. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan potensi sosial budaya lokal yang mendukung perilaku sadar gizi.

PEMBAHASAN

Pengertian kebijakan penanggulangan stunting pada balita

Kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dalam berbagai interaksi yang berlangsung. Penurunan stunting merupakan permasalahan mendesak dan menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, jumlah penderita stunting memperlihatkan jumlah yang signifikan dan belum menunjukkan adanya penurunan yang pasti. Oleh karena itu, analisis penanggulangan stunting pada balita dapat dijadikan sebagai pijakandalam menjelaskan sejauh mana upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mewujudkan capaian kebijakan.

Tujuan penanggulangan stunting pada balita

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 tentang Renvan Kerja Pemerintah tahun 2019 menjelaskan bahwa program kerja kegiatan penurunan stunting telah menjadi salah satu kegiatan prioritas nasional. Untuk itu organisasi pemerintah daerah yang ada di daerah kabupaten/kota bersama-sama menanggulangi stunting. Baik dari intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif.

Kabupaten Solok telah menjadi fokus pemerintah dalam penanganan stunting sejak 2019. Kegiatan yang dilakukan mulai dari sosialisasi tentang gizi dari pihak dinas kesehatan Kabupaten Solok dilaksanakan yang menjadi fokus stunting (Dinas Kesehatan, 2019).

Tujuan dari pengaturan pelaksanaan teknis surveilans gizi:

- 1) Memberikan pedoman terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga pelaksana program gizi guna mendukung pencapaian program perbaikan gizi
- 2) Menata penyelenggaraan surveilans gizi di seluruh tingkatan pemerintahan
- 3) Mendeskripsikan secara menyeluruh tentang permasalahan gizi dan pencapaian indikator kinerja gizi

Cara Kerja penanggulangan stunting pada balita

Menurut peraturan pemerintah

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang penurunan stunting. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Solok No. 35 Tahun 2019, maka ditetapkan 5 pilar penurunan yaitu:

- 1) Komitmen dan visi pimpinan daerah
- 2) Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas
- 3) Konvergensi, koodinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat
- 4) Akses pangan bergizi dan keamanan pangan
- 5) Pemantauan dan evaluasi

Menurut pada penelitian

Alternatif kegiatan yang dapat dilakukan:

- 1) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat terutama terkait peningkatan pola asuh keluarga terhadap anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam bentuk pelatihan pembuatan makanan pendamping ASI yang berkualitas baik melalui kegiatan posyandu dan PKK
- 2) Penerapan modn intervensi pencegahan dan penanggulangan stunting melalui praktek pembuatan produk dan penerapan PMT balita dengan memanfaatkan bahan pangan lokal seperti daging dan ikan
- 3) Optimalisasi pemanfaatan dana desa melalui rehabilitasi poskesdes, polinde, dan posyandu, konseling dan penyediaan makan sehat untuk peningkatan gizi balita, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, penyediaan sumber air bersih dan MCK

- 4) Peningkatan peran kader kesehatan dan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan kader kesehatan tentang pemantauan status gizi balita melalui pelatihan tentang pengukuran berat badan dan panjang atau tinggi badan.

Faktor-faktor stunting pada balita

Faktor penghambat

- a. Rendahnya komitmen dan kerjasama organisasi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Solok
- b. Pola pikir masyarakat yang masih rendah dan sulit diubah
- c. Keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran yakni keterbatasan pelayanan kesehatan, ahli gizi dan penyuluhan lapangan dalam intervensi gizi
- d. Kurangnya inovasi dari organisasi pemerintah daerah atau lembaga terkait penanggulangan stunting pada balita

Faktor pendukung

- a. Adanya kebijakan daerah yang dapat dijadikan sebagai pedoman penurunan stunting
- b. Ketersediannya sumber daya manusia yang memadai pelaksanaan kampanye penurunan stunting
- c. Dukungan pemerintah daerah maupun pusat

KESIMPULAN

Kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Solok Sumatera Barat merupakan bagian penting dari upaya mengurangi penderita stunting pada balita yang jumlahnya mencapai sebesar 36,2% lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu 35,3%. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dari upaya pencegahan stunting di Kabupaten Solok Sumatera Barat masih belum mencapai titik keberhasilan dilihat masih belum maksimal maka dari itu dibuatlah peraturan. Berikut ini yang dibuat oleh pemerintah yaitu menerapkan peraturan yang sudah di buat yaitu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. Dalam hal ini pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan kelembagaan yang memiliki peranan strategi. Pemerintah perlu memperkuat dukungan sumberdaya manusia dan anggaran yang memadai melalui kebijakan tertentu.

Alternatif kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting yang diusulkan dengan memanfaatkan potensi lokal adalah optimalisasi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan stunting antara lain melalui peningkatan sosialisasi tentang risiko anak stunting terhadap kecerdasan kepada masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan potensi sosial budaya lokal yang mendukung perilaku sadar gizi antara lain dengan pelatihan pembuatan makanan pendamping ASI yang berbasis pangan lokal.

Terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan pemerintah agar upaya penanggulangan stunting pada balita berikut ini beberapa alternatif kebijakannya, yaitu: 1. Optimalisasi peningkatan pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan stunting antara lain peningkatan sosialisasi untuk pencegahan stunting melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, 2. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan potensu sosial budaya yang mendukung sadar gizi, melalui kegiatan pelatihan pembuatan makanan pendamping ASI yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 3(1).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2013). Laporan Riset Kesehatan Dasar 2013. *Badab Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*
- Bungin, B. (2010). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana.
- Niga, D. M., & Purnomo, W. (2016). Hubungan Antara Praktik Pemberian Makan, Perawatan Kesehatan, Dan Kebersihan Anak Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 1-2 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Oebobo Kota Kupang. *Wijaya*, 3(2), 151–155
- Febrian & Yusran. 2021. Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 3, 11–21.
- Iqbal dan Yusran. 2021. Upaya Konvergensi kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 3.
- Kementerian Kesehatan Republic Indonesia. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Upaya Perbaikan Gizi*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: CAPS
- Islamy, M. I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian Kesehatan RI. (2018). *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Jakarta.
- Kementrian PPN/Bappenas. (2018). *Pedoman Pelaksana Intervensi Penurunan Stunting Terintegritas di Kabupaten/Kota*. Jakarta
- [4130-Article Text-35895-1-10-20210629_2.pdf](#)
- [661-Article Text-2424-1-10-20220412.pdf](#)
- [33-Article Text-243-1-10-20221014.pdf](#)
- [32-Article Text-244-1-10-20221014.pdf](#)

Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Go-Online (Gool) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo

Achmad Budi Isharyono¹, Dra. Susi Hardjati, M.AP^{2*}

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat e-mail : budiisharyono30@gmail.com

*Corresponding author: susi_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak

Administrasi kependudukan merupakan sebuah dokumen yang penting untuk dimiliki oleh setiap masyarakat. Selain berguna untuk identitas diri, dokumen kependudukan nantinya juga berfungsi untuk mengakses berbagai pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan pada masyarakat menciptakan sebuah inovasi pelayanan kependudukan yang bernama Go-Online (GOOL). Langkah ini menjadi solusi terbaik dalam memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Dispendukcapil Kota Probolinggo terus berusaha mengoptimalkan layanan melalui inovasi bersistem online. Akan tetapi dengan adanya inovasi tersebut, dalam pengembangannya masih ditemukan kekurangan dan kelemahan, terlebih lagi culture masyarakat Probolinggo yang masih juga menyesuaikan dengan adanya inovasi tersebut. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan data primer melalui wawancara in depth interview serta observasi dari informan terkait. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1. Relative Advantage bahwa masyarakat di Kota Probolinggo masih cenderung lebih suka menggunakan layanan offline daripada online dikarenakan inovasi layanan juga dalam masa transisi dalam mengubah budaya masyarakat yang dahulunya offline untuk berganti layanan online. 2. Compability (Kesesuaian) proses penyesuaian inovasi layanan administrasi kependudukan Go-Online (GOOL) masih dalam kondisi transisi penyesuaian dari layanan offline ke online mengalami hambatan yang dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat Kota Probolinggo yang rata-rata masih terbiasa menggunakan layanan offline, sehingga membutuhkan waktu dalam proses pengembangan inovasi layanan tersebut. 3. Complexity (Kerumitan) layanan administrasi kependudukan Go-Online (GOOL) adanya pembelajaran dan penyesuaian, karena sosialisasi yang terus dijalankan dengan prosedur yang ada. 4. Triability (Dapat diuji Coba) inovasi layanan Go-online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo mampu memberikan kemudahan dan memangkas waktu yang lebih cepat daripada layanan offline. 5. Observeability (Dapat di observasi) hadirnya Inovasi Pelayanan Publik Go-online (GOOL) di Kota Probolinggo, yaitu waktu pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan mudah dibandingkan sebelum adanya inovasi.

Kata Kunci: *Inovasi Layanan Go-Online (GOOL), Relative Advantage, Compability, Complexity, Triability, Observeability*

Abstract

Population administration is an important document to be owned by every citizen. As well as being useful for self-identification, population documents will later also function to access various public services. The Department of Population and Civil Registration of Probolinggo City in improving the services provided to the community created a population service innovation called Go-Online (GOOL). This step is the best solution in facilitating the community in managing population administration. Dispendukcapil of Probolinggo City continues to try to optimize services through online system innovation. However, with this innovation, deficiencies and weaknesses were still found in its development, especially the culture of the Probolinggo people who are still adapting to this innovation. This research method is descriptive qualitative with primary data collection through in-depth interviews and observations from related

informants. Based on the results of the study that: 1. Relative Advantage that people in Probolinggo City still tend to prefer using offline services rather than online because service innovation is also in a transitional period in changing the culture of people who were previously offline to switch to online services. 2. Compatibility, the process of adjusting the Go-Online population administration service innovation (GOOL) is still in a transitional state of adjustment from offline to online services, experiencing obstacles due to the culture of the people of Probolinggo City, who on average are still accustomed to using offline services, so it takes time. in the service innovation development process. 3. Complexity of the Go-Online population administration service (GOOL) where there is learning and adjustment, due to ongoing socialization with existing procedures. 4. Triability The Go-online service innovation (GOOL) of the Probolinggo City Population and Civil Registration Service is able to provide convenience and cut times faster than offline services. 5. Observeability (observable) the presence of the Go-online Public Service Innovation (GOOL) in Probolinggo City, namely the service time provided is faster and easier than before the innovation.

Keywords: *Service Innovation Go-Online (GOOL), Relative Advantage, Compability, Complexity, Triability, Observability*

Pendahuluan

Indonesia negara kepulauan yang persebaran penduduknya sangat luas mencakup beberapa wilayah provinsi dan kabupaten atau kota sehingga tidak menutup kemungkinan kerap kali muncul berbagai permasalahan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penyelenggara negara dituntut untuk dapat bekerja ekstra mulai dari pemerintah pusat hingga sampai pemerintah daerah.

Adanya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dapat memungkinkan terselenggaranya pelayanan administrasi melalui jalur birokrasi yang lebih ringkas serta dapat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan peningkatan kualitas layanan publik pada bidang administrasi kependudukan. Hal ini merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang didalamnya meliputi tugas pokok dan fungsi, mendaftarkan serta menerbitkan e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian hingga pencatatan mutasi dan pengolahan data penduduk.

Pelayanan administrasi publik tersebut akan menjadikan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan sebuah pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penyusunan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, pemberian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah semakin dihadapkan dengan berbagai macam tantangan yang makin kompleks. Masih banyak ditemukan keluhan dari masyarakat dalam melakukan kepengurusan kependudukan terhadap instansi yang berkaitan tentang kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan tuntutan dari masyarakat semakin beragam atas pelayanan yang diberikan, maka dari itu administrasi publik dituntut untuk mampu menjawab berbagai tantangan dari persoalan-persoalan pelayanan publik dengan berbagai macam alternatif.

Di era digital yang semakin maju sekarang ini, pemerintah harus lebih sensitif serta tanggap dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Begitupula dengan penyelenggara dokumen administrasi publik yang harus selalu memodernisasikan dirinya, menemukan strategi serta pendekatan terhadap masyarakat dengan lebih jitu, serta terus berusaha memperbaharui teori dan instrumentasi agar tidak semakin tertinggal dengan kemajuan jaman. Dalam hal ini salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan inovasi.

Pentingnya inovasi pelayanan publik berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendorong pemerintah sebagai penyedia layanan untuk terus menciptakan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Inovasi pelayanan publik adalah jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Dengan adanya Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, setiap daerah dapat membuat inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi di daerahnya, dengan demikian inovasi yang tercipta akan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut (Taufiqurokman & Satispi, 2018) kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai bentuk siap, yang diperoleh dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang nyata-nyata mereka

terima dengan layanan yang mereka harapkan. Jika realita lebih tinggi dari apa yang diharapkan, maka pelayanan tersebut dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang dari apa yang diharapkan, maka pelayanan yang telah diberikan tidak bermutu, dan jika realita sama dengan harapan maka pelayanan tersebut dapat dikatakan baik atau memuaskan dan layak untuk dipertahankan.

Kualitas pelayanan publik dapat dijadikan tolak ukur dari hasil kinerja pemerintah itu sendiri sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu dibenahi. Berdasarkan Peraturan MenPAN Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Terdapat pertimbangan teknis metodologis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya peningkatan kualitas pelayanan harus dengan tindakan nyata perbaikan, partisipasi masyarakat pengguna pelayanan, tindakan perbaikan pelayanan disampaikan secara transparan kepada para pengguna pelayanan.

Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas daerah sekitar 56,667 Km² yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kadopok, Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kanigaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengurusan kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat semakin tahun semakin meningkat. Administrasi kependudukan merupakan sebuah dokumen yang penting untuk dimiliki oleh setiap masyarakat. Selain berguna untuk identitas diri, dokumen kependudukan nantinya juga berfungsi untuk mengakses berbagai pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan pada masyarakat menciptakan sebuah inovasi pelayanan kependudukan yang bernama Go-Online (GOOL). Langkah ini menjadi solusi terbaik dalam memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Dispendukcapil Kota Probolinggo terus berusaha mengoptimalkan layanan melalui inovasi bersistem online.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan maksud tujuan tertentu. Secara umum tujuan penelitian bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Memahami berarti bahwa memperjelas suatu masalah yang belum diketahui sebelumnya. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:9) adalah suatu metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, hal ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Landasan teori dimanfaatkan sebagai penulisan agar fokus penelitian sesuai dengan fenomena di lapangan. Pendekatan penelitian ini penulis gunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran yang komperensif mengenai Inovasi Pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Go-Online (GOOL) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo.

Pada akhirnya jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan atau menganalisa Inovasi Layanan Pengurusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Go-Online Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo.

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi yang digunakan oleh penulis untuk mencari dan

mengumpulkan sumber-sumber data secara akurat yang ada dilapangan. Penulis memilih dan menetapkan lokasi penelitian ini di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo. Pemilihan lokasi penelitian oleh penulis berdasarkan pertimbangan dengan judul objek penelitian yang dipilih. Adapun alasan obyektif penulis memilih lokasi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo sebagai satu-satunya instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan Kepengurusan Catatan Sipil untuk masyarakat Kota Probolinggo.
2. Terdapat suatu fenomena yang terjadi di Dispenduk Capil Kota Probolinggo khususnya pada bagian pelayanan pencatatan sipil secara online
3. Dispenduk Capil Kota Probolinggo selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam memberikan kemudahan dan inovasi pelayanan pengurusan pencatatan sipil untuk masyarakat Kota Probolinggo
4. Keinginan dari peneliti untuk mengetahui program inovasi pelayanan dalam upaya memudahkan akses masyarakat dalam mengurus pencatatan sipil secara online di Dispenduk Capil Kota Probolinggo.

Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif selalu diawali dengan masalah penelitian. Masalah penelitian tersebut wajar diteliti sesuai dengan jenis atau tipe penelitian yang digunakan. Menurut Yusuf (2014:366) masalah dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif mudah berubah dan dapat diubah, apabila kenyataan dan kondisi lapangan menghendaknya. Menurut Spradley (Sugiyono 2013:209) juga mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan IPTEK
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada

Hasil

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dijelaskan oleh Rogers (Suwarno, 2008) terdiri dari lima aspek untuk menganalisis Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Go-Online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. *Relative advantage* (keuntungan): Suatu inovasi harus memiliki nilai lebih dan keuntungan dalam penerapan layanan sebelumnya. Dalam variabel keuntungan terdapat dua sasaran kajian yang akan diteliti, yaitu: a). Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan online dan b). Akselerasi estimasi waktu pengurusan administrasi kependudukan.
2. *Compatibility* (kesesuaian): inovasi pelayanan publik terdiri dari dua sasaran kajian yaitu; a) Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau penyesuaian dengan inovasi yang diganti; b) Dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi secara cepat.
3. *Complexity* (kompleksitas): Inovasi pelayanan Go-Online terdiri dari dua sasaran kajian, yaitu; a) Sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya; b) Inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik. maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah yang penting.
4. *Triability* (dapat diuji coba): inovasi pelayanan Go-Online terdiri dari dua sasaran kajian yaitu; a) Inovasi harus melewati fase uji publik dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. b) Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama.
5. *Observability* (dapat diobservasi): inovasi pelayanan publik yaitu Observability (Kemudahan diamati) terdiri dari dua sasaran kajian yaitu; a) Inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja; b) Menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
6. *Relative advantage* (keuntungan):

Inovasi Pelayanan Go Online telah memberikan kemudahan akses informasi secara mudah dan cepat bagi masyarakat yang berupa satu portal alamat web browser, layanan aplikasi pesan whatsapp dan sosial media instagram maupaun facebook yang sudah terintegrasi dengan operator layanan Go Online. Inovasi Pelayanan Go Online juga memberikan keuntungan berupa akselerasi estimasi waktu pengurusan administrasi kependudukan dengan lebih cepat dibandingkan layanan offline.

7. *Compatibility* (kesesuaian):

Dalam hal ini inovasi pelayanan Go Online juga melakukan penyesuaian dengan budaya masyarakat yang belum terbiasa melakukan pengurusan administrasi kependudukan secara online, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tidak serta merta menghapus atau menghilangkan layanan sebelumnya. Dalam masa transisi dari layanan offline ke layanan online maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo melakukan sosialisasi inovasi pelayanan Go Online guna mempercepat proses adaptasi masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan inovasi pelayanan Go Online.

8. *Complexity* (kompleksitas):

Kerumitan dalam Inovasi Pelayanan Go Online dibandingkan layanan sebelumnya adalah penambahan perangkat elektronik smartphone dan komputer serta jaringan internet yang mutlak harus dimiliki masyarakat untuk menggunakan layanan Go Online dikarenakan layanan ini berbasis digital. Hal itu juga disesuaikan dengan kalangan masyarakat kelas menengah kebawah sehingga tetap mendapat hak fasilitas yang sama. Inovasi pelayanan Go Online menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik untuk mengurus administrasi kependudukan. Tingkat kerumitan dalam inovasi pelayanan Go Online dimasa transisi ini tidak menjadi masalah yang penting dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo telah melakukan sosialisasi terkait keseleruhan informasi inovasi pelayanan Go Online.

9. *Triability* (dapat diuji coba):

Inovasi Pelayanan Go Online telah melakukan ujicoba untuk mengetahui kualitas dari sistem layanan Go Online. Fase ujicoba layanan Go Online dilakukan secara dua tahap yaitu dilingkungan internal pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, kemudian setelah dirasa layak baru melakukan ujicoba sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Dari fase ujicoba publik Inovasi pelayanan Go Online sudah bisa diterima masyarakat dan terbukti memiliki keuntungan dari layanan sebelumnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya masyarakat yang sudah mengajukan permohonan pengurusan administrasi kependudukan di layanan Go Online.

10. *Observability* (dapat diobservasi):

Inovasi pelayanan Go Online selalu dilakukan pemantauan sebagaimana sistem Go Online bekerja untuk menilai kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat dilakukan evaluasi. Walaupun telah terbukti memberikan kemudahan namun masih ada kendala dalam setiap implementasinya. Inovasi pelayanan Go Online dilakukan evaluasi setiap tahunnya guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan bisa lebih diterima masyarakat.

Pembahasan

Tujuan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Go-Online (GOOL) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, yakni memberikan kemudahan akses layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat, memberikan layanan dengan prosedur yang efisien, efektif, cepat dan terintegrasi, meminimalkan terjadinya kontak langsung antara petugas layanan dengan pemohon sehingga mengurangi potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme layanan, mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Probolinggo, menjamin ketersediaan arsip data pelayanan secara akurat, arsip dokumen berkas pengajuan secara langsung tersimpan secara digital.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dijelaskan oleh Rogers yang terdiri dari lima aspek untuk menganalisis inovasi pelayanan administrasi kependudukan Go-Online (GOOL) pada dinas

kependudukan dan catatan sipil Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. *Relative advantage* (keuntungan)

Relative advantage atau keuntungan relatif merupakan salah satu indikator yang terdapat dalam atribut inovasi pelayanan publik yang digunakan untuk mengetahui suatu nilai kebaruan yang ada di dalam inovasi pelayanan publik tersebut. Karena inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya program Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Go-Online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo memang memberikan kemudahan akses layanan informasi kepada masyarakat probolinggo. Guna mengetahui informasi dan apa saja yang ada di laman Go Online dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, akan tetapi kemudahan yang diberikan tersebut tidak serta merta menjadi mudah akan tetapi ada aturan mengenai hal tersebut bilamana terdapat masyarakat yang menggunakan layanan tersebut pada waktu yang ditentukan, dan apabila melewati jam kerja maka layanan dari pengguna atau masyarakat akan diselesaikan pada jam kerja keesokan harinya.

Kemudian mengenai Estimasi waktu pengurusan administrasi kependudukan pada pelayanan administrasi kependudukan Go-Online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagai narasumber menyatakan adanya estimasi pengurusan yang cepat dengan menggunakan GOOL karena sifatnya yang online, jadi menurut narasumber lebih enak menggunakan aplikasi go-online ketimbang yang offline karena biasanya pengurusan memakan waktu sehari dengan Go-online pengurusan dokumen hanya 2 jam saja. Akan tetapi di dalam hasil penelitian ini data statistic menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Probolinggo cenderung lebih suka menggunakan layanan offline daripada online, oleh karena itu apakah sosialisasi program inovasi pelayanan administrasi kependudukan go-online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo sudah tepat sasaran atau masyarakat Probolinggo yang kurang melek teknologi akan program tersebut, karena dari data yang ada hanya sebagian masyarakat yang menggunakan layanan go-online (GOOL) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo hal inilah yang harusnya menjadi kajian evaluasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo.

2. *Compatibility* (kesesuaian)

Compatibility atau kesesuaian dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak dibuang begitu saja. Inovasi yang lama harus menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi yang baru dengan tujuan agar masyarakat Probolinggo tidak kaget dengan model pelayanan yang baru sehingga masih memerlukan penyesuaian. Sebelum diterapkannya layanan go-online (GOOL) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, pelayanan online sebelumnya menggunakan aplikasi Whatsapp. Kemudian kedua sistem ini digabungkan dan dibuatkan pelayanan online yang dikenal dengan sebutan layanan go-online (GOOL) yang merupakan aplikasi berbasis website, kesesuaian ini berkaitan dengan kecocokan inovasi yang baru dibuat oleh instansi tersebut apakah masih sesuai dengan standar pelayanan yang diterapkan. Pelaksanaan pelayanan online go-online (GOOL) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo ini telah menerapkan inovasi yang masih sesuai dengan standar pelayanan instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 terkait Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Dengan begitu, inovasi ini telah sesuai dengan standar pelayanan admindukcapil yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo.

Berkaitan dengan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, inovasi pelayanan go-online (GOOL) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo telah menyesuaikan kondisi masyarakat Probolinggo pada khususnya yang semakin membutuhkan pelayanan yang mudah dan praktis. Terutama pada saat ini terjadi peristiwa pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat dalam menghindari kerumunan sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi. Kesesuaian inovasi dengan kebutuhan

masyarakat ditunjukkan pula dengan adanya peningkatan yang signifikan dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh masyarakat yang semula menggunakan pelayanan offline beralih menggunakan pelayanan online melalui go-online (GOOL) ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses penyesuaian tersebut masih dalam kondisi transisi yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo dari layanan offline ke layanan online mengalami hambatan yang dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat Kota Probolinggo yang rata-rata masih terbiasa menggunakan layanan secara offline karena ketidakpahaman masyarakat akan perkembangan teknologi. Selain itu terhambatnya proses transisi layanan Go-Online juga di latarbelakangi oleh kondisi geografis luas Kota Probolinggo yang relatif kecil dan mudah dijangkau sehingga sebagian masyarakat lebih memilih datang ke MPP (Mall Pelayanan Publik).

3. Complexity (kompleksitas):

Complexity (Kerumitan) merupakan tingkat kesukaran memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Ada inovasi yang dengan mudah dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat inovasi dapat diadopsi. Inovasi Go-Online (GOOL) telah diterapkan karena memiliki kemudahan dalam penggunaannya. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya program Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Go-Online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, berkaitan dengan tidak semua masyarakat Probolinggo memiliki pemahaman yang sama dalam hal perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga dalam mengantisipasinya dibuat pelayanan offline di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo maupun Kantor Kecamatan (pelayanan front office atau tatap muka) demi membantu masyarakat yang kurang paham. Dari hasil penelitian sebagaimana masyarakat Probolinggo juga menerima dengan baik dengan adanya inovasi tersebut, hanya saja membutuhkan waktu, pembelajaran dan penyesuaian karena yang dulunya offline menjadi online. Prosedur inovasi layanan Go-Online (GOOL) bukanlah hal yang rumit, karena sosialisasi yang terus dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tidak merasa dipersulit dengan prosedur yang ada.

4. *Triability* (dapat diuji coba):

Suatu inovasi dapat diterima manakala sudah diterapkan atau diuji coba di masyarakat. Inovasi pelayanan pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Go-Online memiliki nilai lebih dan keuntungan sehingga dapat diuji coba dan diterapkan di masyarakat. Sebelum pelaksanaan layanan Go-Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo melakukan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh RT, RW. Pelaksanaan sosialisasi ini diberikan diawal sebelum layanan Go-Online dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa inovasi layanan Go-online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo mampu memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat atau pengguna layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, karena dari inovasi layanan tersebut dapat memberikan kemudahan dan memangkas waktu yang lebih cepat daripada layanan offline, akan tetapi inovasi layanan ini masih butuh penyesuaian atau transisi layanan mengingat dulunya yang masih offline menjadi online. Dari hasil penelitian terkait layanan Go-Online dalam variabel *Triability* (Kemungkinan ujicoba) dapat disimpulkan bahwa Go-Online sudah dilakukan fase ujicoba karena terbukti memiliki keunggulan dan keuntungan namun bukan berarti layanan Go-Online langsung diterima masyarakat, hal tersebut masih menjadi pengembangan yang berkelanjutan dari inovasi layanan Go-online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dan harus dibuktikan seiring berjalannya waktu dari efektifitas dan efisiensi dari antusias masyarakat menggunakan layanan tersebut.

5. *Observability* (dapat diobservasi):

Suatu inovasi dapat dipahami sehingga dapat dinilai dalam segi kemudahan dan kesulitannya. Dengan adanya pengamatan, Inovasi pelayanan pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kota Probolinggo dapat dilakukan evaluasi dalam sistemnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa inovasi layanan Go-online (GOOL) dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Probolinggo bahwa inovasi

Pelayanan Publik Go-online (GOOL) dapat dengan mudah diamati oleh masyarakat karena pelayanan yang diberikan bersifat terbuka dan masyarakat dapat melihat langsung proses pengurusan surat-surat administrasi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Probolinggo. Akan tetapi, waktu penyelesaian pengurusan surat-surat administrasi kependudukan juga bergantung kepada pemohon itu sendiri. Apabila persyaratan yang dibutuhkan belum lengkap, berkas tersebut akan di kembalikan lagi kepada pemohon, hal tersebut tentunya akan membutuhkan waktu lebih lama terhadap proses penyelesaian berkas-berkas administrasi kependudukan. Inovasi Pelayanan Publik Go-online (GOOL) dapat diamati secara fisik dan cara kerja terletak pada kegiatan monitoring pada laman dashboard operator. Operator Go-online (GOOL) dengan mudah mengetahui dan memproses data input berupa permohonan yang masuk pada website kemudian diolah dan diteruskan kepada pusat untuk mendapatkan konsolidasi manual. Sistem penunggalan data yang digunakan Go-online (GOOL) berupa periode sistem dari pusat, yang membutuhkan proses, melalui *warehouse database*, diatasi dengan konsolidasi manual, data terdistribusi. Data yang masuk diolah dahulu oleh operator, berupa pengajuan yang diajukan pemohon untuk dilihat kelengkapan berkas dan dapat diproses pada tahap selanjutnya.

Inovasi Go-online (GOOL) terus dipantau perkembangannya, sehingga dalam hal memonitoring berjalannya sistem dilakukan observasi setiap bulannya untuk mengetahui sejauh mana Go-online (GOOL) dimanfaatkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, serta untuk memperbaiki permasalahan yang dialami oleh aplikasi berbasis website tersebut dan juga dilakukan pendataan berupa pelaporan jumlah data pemohon yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bertujuan memberikan kemudahan dalam pengamatan perkembangan Go-online (GOOL) baik bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo maupun bagi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi pelayanan Go-online (GOOL) yang dilakukan sehingga terciptanya transparansi. Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa Inovasi Pelayanan Go-online (GOOL) Kota Probolinggo telah sesuai dengan atribut inovasi *Observability* atau kemudahan diamati. Hadirnya Inovasi Pelayanan Publik Go-online (GOOL) di Kota Probolinggo memberikan dampak yang sangat positif terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu waktu pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan mudah dibandingkan sebelum adanya inovasi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Inovasi Pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Go-Online (GOOL) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, adapun kesimpulan dari penelitian ini, yakni:

1. *Relative Advantage* (Keuntungan)
Pelayanan administrasi kependudukan Go-Online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat Probolinggo berupa akselerasi estimasi waktu pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sebelumnya dapat memakan waktu lebih dari satu hari menjadi maksimal 1 x 24 jam saja. Kemudian. Hadirnya Inovasi Pelayanan Publik Go-online (GOOL) di Kota Probolinggo memberikan dampak yang sangat positif terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu waktu pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan mudah dibandingkan sebelum adanya inovasi
2. *Compability* (Kesesuaian)
Bahwa proses penyesuaian inovasi layanan administrasi kependudukan Go-Online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo masih dalam kondisi transisi penyesuaian dari layanan offline ke layanan online. Masih adanya hambatan yang dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat Kota Probolinggo yang rata-rata masih terbiasa menggunakan layanan secara offline, sehingga membutuhkan waktu dalam proses pengembangan inovasi layanan tersebut.
3. *Complexity* (Kerumitan)
Bahwa sebagaimana masyarakat Probolinggo atau pengguna inovasi layanan administrasi kependudukan Go-Online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Probolinggo

menerima dengan baik dengan adanya inovasi tersebut. Prosedur inovasi layanan Go-Online (GOOL) bukanlah hal yang rumit, karena sosialisasi yang terus dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sehingga masyarakat pengguna layanan Go Online tidak merasa dipersulit dengan prosedur yang ada.

4. *Triability* (Dapat diuji Coba)

Inovasi layanan Go-online (GOOL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo telah dilakukan ujicoba dalam inovasinya, mulai dari ujicoba lingkungan internal dukcapil hingga ujicoba publik. Dan saat ujicoba publik layanan kependudukan Go Online diterima baik oleh masyarakat yang dirasa mampu memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat atau pengguna layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

5. *Observeability* (Dapat di observasi)

Inovasi Pelayanan Go-online (GOOL) Kota Probolinggo telah sesuai dengan atribut inovasi Observability atau kemudahan diamati. Dari pengamatan tersebut maka penyedia jasa layanan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo terus melakukan evaluasi dalam pengembangan sistemnya sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- A, Taufiqurokhan & Satispi, E. (2018). Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. UMJ PRESS.
- Anjani, W. S., Hanapiah, P., & -, R. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Melalui Kegiatan Samsat Masuk Desa. Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo Tahun 2021
- Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya) Edisi Revisi. Gava Media.
- Hiplunudin, Agus. 2017. Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Calpulis.
- Mirnasari, R. M. (2013). Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih. Kebijakan Dan Manajemen Publik.
- A, Taufiqurokhan & Satispi, E. (2018). Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. Ciputat, Tangerang Selatan: UMJ PRESS.
- Harbani Pasolong. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: CV. Alfabeta
- Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Milles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, a Methods Sourcebook. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pasolong, H. (2012). Metode Penelitian Administrasi Publik (kesatu). Bandung: Alfabeta.
- Ratminto & Septi, A. (2005). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, L. P. (2008). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P. dkk. (2011). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. In STIA-LAN Press (Pertama). Jakarta: STIA-LAN Press.
- Umar, H. (2004). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Analisis Manajemen Aset Sekolah Dasar 001 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Dalam Mendukung Proses Pembelajaran

Brigita clara¹, Dr.Sri Umiyati M.Si^{2*},
¹Universitas Hangtuah Surabaya, Indonesia
²Universitas Hangtuah Surabaya, Indonesia
Umiyati.uht@gmail.com brigitaclara@gmail.com,

Abstract

This study aims to describe and analyze the asset management of facilities and infrastructure in Karimun 001 Primary School in supporting the learning process. This type of research uses a qualitative approach. The research data were obtained through observation, interview, and documentation methods. The informants of this research are the coordinating teacher of facilities and infrastructure, administration, school committee and head of the field of primary school development of the Karimun district education office. The object of this research is the analysis of asset management of facilities and infrastructure which includes planning, procurement, inventory, maintenance, and removal. The results of the research on asset management of facilities and infrastructure in primary school 001 karimun sub-district, namely: 1) Planning is carried out once a year and a joint meeting is held first but there are obstacles to the source of funds. 2) Procurement is carried out according to the needs that have been planned. 3) Investarization is already running but there are obstacles to asset coding. 4) Maintenance is carried out together with teachers, students and school committees 5) Deletion is carried out by recording goods then submitting a request letter to the Education Office.

Keywords: Asset Management, Infrastructure Facilities, Primary School 001 Karimun

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Menggambarkan dan menganalisis manajemen aset sarana dan prasarana di Sekolah Dasar 001 Karimun dalam mendukung proses pembelajaran. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun data penelitian diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah guru koordinator sarana dan prasarana, tata usaha, komite sekolah dan kepala bidang pembinaan sekolah dasar dinas pendidikan kabupaten karimun. Objek penelitian ini adalah analisis manajemen aset sarana dan prasarana yang meliputi perencanaan, pengadaan, investarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Hasil penelitian Manajemen aset sarana dan prasarana di sekolah dasar 001 kecamatan karimun yaitu: 1) Perencanaan di lakukan setahun sekali dan di lakukan musyawarah bersama terlebih dahulu namun terdapat hambatan pada sumber dana. 2) Pengadaan di lakukan menyesuaikan kebutuhan yang telah di rencanakan. 3) Investarisasi sudah berjalan namun terdapat hambatan pada pengkodean aset. 4) Pemeliharaan di lakukan bersama dengan guru, murid dan komite sekolah 5) Penghapusan dilakukan dengan cara mendata barang kemudian mengajukan surat permohonan ke Dinas Pendidikan.

Kata Kunci: Manajemen Aset, Sarana Prasarana, Sekolah Dasar 001 Karimun

Pendahuluan

Pendidikan merupakan bidang yang memfokuskan kegiatan pada proses belajar mengajar. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, standar sarana dan prasarana di Sekolah Dasar sudah dirinci secara jelas. Di tingkat Sekolah Dasar, sarana dan prasarana minimal adalah ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang guru, tempat beribadah, ruang Usaha kesehatan sekolah, Kamar mandi, meliputi: jamban/toilet/WC, Gudang, Ruang sirkulasi (jendela, ventilasi), Tempat bermain/berolahraga. Sarana dan prasarana termasuk dalam aset fisik. Aset fisik (physical assets) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aset berwujud seperti seperti properti, peralatan, perabot, persediaan dan barang habis pakai.

Dalam mencapai proses pendidikan yang berkualitas bukanlah hal yang mudah di perlukan manajemen yang tepat. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Manajemen aset dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset lebih bermanfaat, setiap lembaga pendidikan harus mengetahui aset yang masih bisa di kelola atau sudah masanya di ganti. Hal ini didukung dari hasil kajian yang dilakukan oleh Aziz & Munir (2021) penulis menjelaskan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas pendidikan juga tidak lepas dalam manajemen aset dan Peran komite sekolah juga berpengaruh dalam meningkatkan aset sarana dan prasarana sekolah.

Dalam hal ini Dinas pendidikan memiliki wewenang dalam mengelola sarana dan prasarana Sekolah Dasar dapat di lihat Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tanggal 18 November 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Karimun dalam melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Sekolah Dasar Di Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun mengatakan dana untuk mengelola sarana dan prasarana di dapatkan melalui dana APBD dan APBN. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sekolah Dasar Negeri 001 Karimun adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

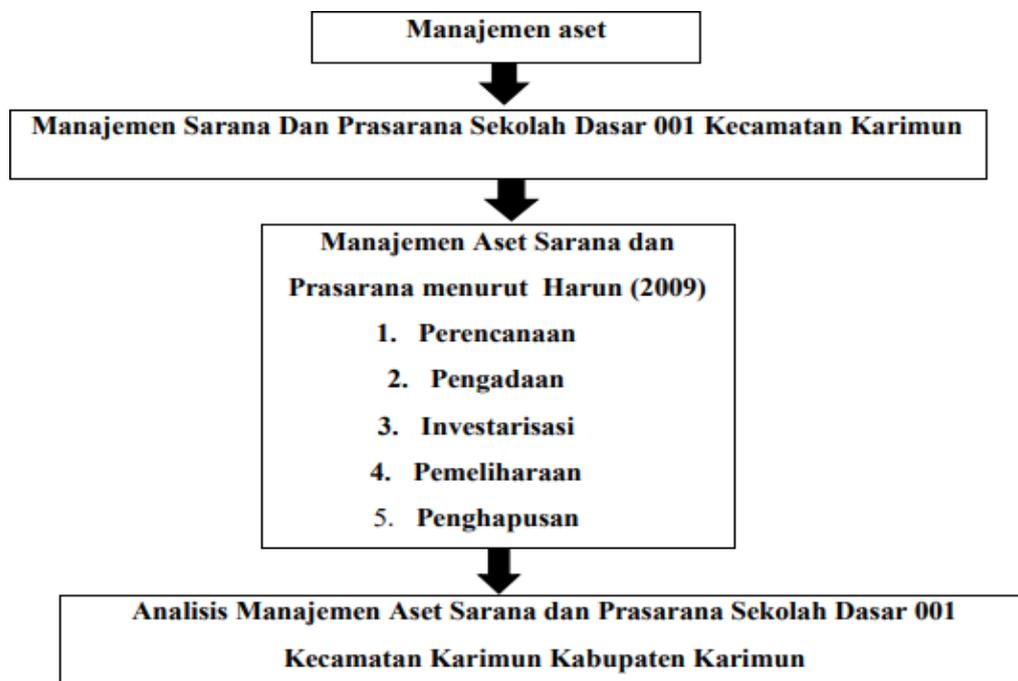
Dalam menjalankan kegiatannya, Sekolah Dasar Negeri 001 Karimun berada di bawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan dan memiliki nilai akreditasi peringkat A (sangat baik) sehingga Sekolah Dasar Negeri 001 kecamatan karimun seharusnya memiliki sarana dan prasarana lebih baik untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Berdasarkan observasi di Sekolah Dasar 001 Kecamatan Karimun yang terletak di Kabupaten Karimun masih belum memadai, baik dari kerusakan yang ada pada aula, gudang, mushola, ruang guru, ruang kepek, rusang guru, ruang olahraga, Uks, WC/ dan fasilitas lain seperti pada kondisi perpustakaan Sekolah Dasar 001 Kecamatan Karimun masih dalam keadaan rusak berat. Dengan kondisi yang terjadi sebagaimana diuraikan diatas perlu dipikirkan bagaimana cara untuk mengatasinya. Kondisi yang dijelaskan diatas memperlihatkan masih lemahnya manajemen aset sarana prasarana yang akan berpengaruh pada proses belajar mengajar. Oleh karena itu peneliti ingin mengadakan penelitian yang berhubungan dengan keadaan yang telah dijelaskan diatas dengan menggunakan indikator Manajemen aset Sarana dan Prasarana menurut Harun (2009) yang memiliki 5 indikator yaitu: 1) Perencanaan, 2) Pengadaan, 3) Investarisasi, 4) Pemeliharaan, 5) Penghapusan. Dari 5 Indikator tersebut maka dapat diketahui Manajemen aset sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar 001 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Penelitian penulis didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khairuddin (2020) Manajemen Aset Sarana Dan Prasarana Sekolah Dalam Peningkatan Akreditasi Madrasah Aliyah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dilakukanlah penelitian mengenai Bagaimana manajemen aset sarana dan prasarana Sekolah Dasar 001 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dalam mendukung proses pembelajaran? Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis manajemen aset sarana dan prasarana Sekolah Dasar 001 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dalam mendukung proses pembelajaran. Sehingga nantinya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen aset sarana dan prasarana.

Metode

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui penelitian lapangan, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan. Menurut Moleong (2011) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan manajemen aset sarana dan prasarana melalui teori Harun (2009) yaitu perencanaan, pengadaan, investasi, pemeliharaan dan penghapusan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2019) terdapat 4 (empat) aktivitas dalam analisis data, yaitu data collection, data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification. Subjek penelitian ini adalah guru koordinasi sarana dan prasarana, tata usaha, komite sekolah dan kepala bidang pembinaan sekolah dasar dinas pendidikan kabupaten karimun. Berikut kerangka konsep dalam bentuk bagan:



Gambar 2.3 Kerangka Konsep

Sumber: Diolah Peneliti 2022

Hasil

Pada pembahasan ini, peneliti ini akan menguraikan mengenai Manajemen aset sarana dan prasarana Sekolah Dasar 001 Kecamatan Karimun dalam mendukung proses pembelajaran. Keberadaan serta kualitas sarana dan prasarana akan berpengaruh terhadap jalannya proses belajar mengajar dan prestasi belajar siswa. Sarana dan prasarana merupakan hal yang tidak boleh diabaikan karena digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. Untuk menganalisis pembahasan ini, peneliti menggunakan teori Harun (2009) dengan variabel perencanaan, pengadaan, investarisasi, pemeliharaan dan penghapusan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan pertama melalui analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Tujuan dari perencanaan adalah demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

2. Kebutuhan sarana dan prasarana

perencanaan aset sarana dan prasarana melalui sub indikator Perencanaan kebutuhan sarana prasarana sudah berjalan melalui mengadakan rapat atau musyawarah bersama untuk menampung semua usulan tentang sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran dan setiap tahun di lakukan perencanaan sarana prasarana untuk menentukan kebutuhan sekolah.

3. Rencana Kebutuhan Dengan Dana

Berdasarkan analisis melalui sub indikator rencana kebutuhan dengan dana belum dapat di katakan berjalan dengan baik sumber dana SD 001 di dapatkan melalui APBN dana BOS dari APBD belum ada alokasi dana dan juga mendapat bantuan dari komite sekolah namun terdapat hambatan dari komite sekolah dalam penggalangan dana karna faktor ekonomi dan pemahaman orangtua tentang penggalangan dana masih terdapat beberapa orangtua murid yang berpikir kebutuhan sekolah sepenuhnya di dapatkan dari dana bos. Maka perlu di tingkatkan kerjasama antara komite sekolah dan pihak sekolah dalam memberikan kepada orangtua murid tentang peraturan tugas komite sekolah.

4. Pengadaan

Pengadaan secara sederhana diartikan sebagai kegiatan membeli dan mendatangkan berbagai jenis sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas sekolah demi mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama dalam penetapan untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran di dalam kelas. Pengadaan sarana dan prasarana pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Berdasarkan analisis Pengadaan Sekolah Dasar 001 Karimun sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari proses pembelian SD 001 Karimun dengan memperhatikan aset yang dibeli dengan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) dan dalam melakukan pembelian berkoordinir dengan dinas pendidikan. Aset yang di berikan melalui hibah maupun pembelian sendiri di tempatkan di tempat yang aman.

5. Investarisasi

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang pertama adalah untuk pengendalian sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang/penerbit (buku), volume/jumlah barang, tanggal perolehan/pembelian barang, mutasi/perubahan, sumber dana dan keterangan barang. Melalui pencatatan yang rinci terhadap sarana dan prasarana pendidikan akan memberikan kemudahan bagi penanggung jawab sarana dan prasarana dalam mengendalikannya sesuai dengan penggunaan dan perawatan barang-barang. Berdasarkan analisis Investarisasi SD 001 Karimun dalam melakukan pencatatan sudah di lakukan oleh tata usaha namun pada pengkodean namun terdapat kendala dalam pemberian kode merk, volum, seri sarana dan prasarana karena yang bertanggung jawab akan pencatatan hanya dari tata usaha sementara aset yang perlu di data cukup banyak dan dari dinas pendidikan dalam memberikan klasifikasi aset berupa hibah cukup lama karena dinas pendidikan bertanggung jawab akan seluruh sekolah yang ada kabupaten

karimun sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang dan waktu yang lama maka menjadi hambatan bagi Sekolah Dasar 001 Karimun pada proses investarisasi.

6. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan peralatan pada kondisi yang dapat diterima. Berdasarkan analisis pemeliharaan Sekolah Dasar 001 Karimun sudah berjalan. Pemeliharaan aset dilakukan dengan merawat dan menjaga aset sarana prasarana dengan bersama-sama. Pemeliharaannya aset dilakukan untuk menjaga agar usia barang bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama namun untuk belum ada petugas khusus kebersihan untuk sekolah dasar 001 karimun.

7. Penghapusan

Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris barang karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil analisis penghapusan di nilai sudah Sesuai. Penghapusan sarana prasarana SD 001 Karimun sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan melakukan pelaporan ke dinas pendidikan terlebih dahulu. Dengan melihat kondisi sarana prasarana terlebih dahulu jika dalam keadaan rusak berat aset akan di hapuskan melalui di bakar. Tujuannya untuk menghilangkan barang dari daftar inventaris sekolah guna meminimalisir anggaran perbaikan

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di SD 001 Kecamatan karimun tentang Analisis manajemen aset sarana dan prasarana sekolah dasar 001 kecamatan karimun kabupaten karimun dalam mendukung proses pembelajaran dengan menggunakan 5 indikator yaitu perencanaan, pengadaan, investarisasi, pemeliharaan dan penghapusan dapat disimpulkan manajemen aset sarana dan prasarana di SD 001 Karimun sudah berjalan namun terdapat kendala pada dana yang di perlukan untuk kebutuhan sarana dan prasarana dan pada pencatatan terdapat kendala karena klasifikasi aset yang di berikan cukup lama dari dinas pendidikan dan Tata usaha bertanggung jawab akan seluruh pencatatan aset sehingga membutuhkan proses pencatatan yang cukup lama dan sekolah dasar 001 karimun belum menyediakan petugas khusus kebersihan sekolah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap manajemen aset sarana dan prasarana di SD 001 Karimun dalam mendukung proses pembelajaran, peneliti memberikan saran sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik, yaitu pada tahap inventarisasi sebaiknya lebih meningkatkan SDM agar proses pencatatan dapat berjalan sesuai yang harapkan dan pada tahap pemeliharaan perlu adanya petugas khusus kebersihan sekolah. Diharapkan untuk pihak sekolah dan pihak komite sekolah melakukan kerja sama dengan melakukan sosialisasi ke orang tua murid agar dalam melakukan penggalangan dana dapat berjalan sesuai yang di harapkan.

Daftar Pustaka

- Aziz et al. 2021. Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Manajemen Aset di SMK Ma'arif 9 Kebumen. *Journal of Islamic Education*.
- Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Harun, C.Z. 2009. Manajemen Sumber Daya Pendidikan. Yogyakarta: Pena Persada Dekstop Publisher.
- Khairuddin. 2020. Manajemen Aset Sarana Dan Prasarana Sekolah Dalam Peningkatan Akreditasi Madrasah Aliyah. *Jurnal Serambi Ilmu*.
- Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.

Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tanggal 18 November 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Karimun dalam melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. Sutrisno, H. 2004. Metodologi Research 2, Andi Offset, Yogyakarta.